

Dr. Dudy Imanuddin, Effendi, M. Ag

Prasangka Sosial: Problematisa Moderasi Beragama

Praktik Pengarusutamaan Moderasi Beragama

1. Prasangka Sosial disebabkan karena wacana menggunakan teori hegemoni
2. Prasangka Sosial disebabkan propaganda isu menggunakan teori benturan peradaban
3. Prasangka Sosial disebabkan karena wacana menggunakan teori agensi
4. Prasangka Sosial disebabkan mispensi modernisasi beragama sebagai great tradition bukan little tradition
5. Prasangka Sosial disebabkan ketegoriisasi sosial di kalangan masyarakat

Upaya Perbaikan Pendidikan Moderasi Beragama

1. Dekonstruksi Sosial
2. Rekonstruksi Sosial
3. Difemasi Toleransi Bagi Sosial

Tujuan Pendidikan Moderasi Beragama

1. Kemampuan berkolaborasi
2. Tolansi dan harmoni sosial
3. Disposisi berkeadilan
4. Keaktifan atau budaya lokal

Prasangka Sosial dan Problematika Pendidikan Moderasi Beragama

dudy.imanuddin@uinsgd.ac.id

Pendahuluan

Prasangka sosial yang terjadi dalam kehidupan beragama di Indonesia sering melahirkan konflik dan pertikaian antar umat beragama. Prasangka yang terjadi disebabkan oleh berbagai alasan, bukan saja berkaitan dengan persoalan doktrin dan pemahaman agama, namun juga selalu beririsan dengan masalah di luar agama seperti persoalan politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Fakta yang berkaitan dengan prasangka sosial dan berujung kepada fenomena kekerasan agama dalam sejarah bangsa Indonesia semenjak masa reformasi 1998 sampai sekarang tahun 2021 telah menunjukkan pelbagai peristiwa konflik sosial yang memprihatinkan. Satu sisi, kelihatannya pemeluk Islam dan pemeluk agama lain belum mendapatkan format sesungguhnya dalam kerukunan beragama di Indonesia. Sisi yang lain, nampaknya sesama pemeluk agama Islam belum memperlihatkan kesadaran yang sama berkaitan dengan praktek perilaku toleransi kehidupan beragama diantara pelbagai kelompok yang berbeda pemahaman.

Hasil penelitian Thomas Santoso (2003:1), Prasangka sosial yang mengarah kepada konflik sebagai fenomena kekerasan agama pada tahun 1998 hingga 2000 tercatat hampir 382 gereja yang mengalami pembakaran, pengrusakan, penutupan, atau diresolusi. Sedangkan menurut Jan S. Aritonang (2004: 536-544), tindakan balasan berupa pengrusakan terhadap sarana Muslim terjadi di Kupang pada tanggal 30 November-1 Desember 1998

sebagai respons pemeluk agama Kristen terhadap peristiwa ketapang pada tanggal 22 Nopember 1998. Peristiwa Ketapang ini mendapat respons kembali dari pemeluk agama Islam yang ada di Ciamis dan Ujung Pandang yang mengakibatkan pembakaran sarana-sarana ibadah Kristen. Peristiwa konflik sosial semakin memuncak dan lebih memilukan dalam peristiwa Poso tahun 1998-2002 dan Ambon pada tahun 1999-2002. Menurut Yewangoe (2006: 100-101), peristiwa konflik horizontal yang terjadi akibat adanya prasangka sosial antar umat beragama di Poso dan Ambon yang berlarut-larut sehingga banyak memakan korban dan materi. Mulai terjadinya penembakan bendahara GKST Pada tanggal 16 November 2003, tewasnya orang Tadoja di Pesisir Poso pada tanggal 18 Juli 2004, tertembaknya Pendeta perempuan Susianti Tinulele sewaktu sedang berkhotbah di gereja Effata di Palu. Bahkan sepanjang tahun 2006 telah terjadi 57 kali peristiwa kekerasan di Poso dan Palu, mulai dari pengeboman dan penembakan. Walaupun menurut Deti Mega Purnamasari (kompas.com, 2019), konflik horizontal berupa fenomena kekerasan agama ini sudah di mediasi oleh Pemerintah pada bulan Desember tahun 2001 melalui Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (menkokesra) dengan dibuatnya deklarasi perdamaian Malino antara umat Islam dan Umat Kristen, dalam skala kecil sepertinya masih terus terjadi. Bahkan ada kecenderungan ingin membangkitkan kembali konflik antar agama seperti yang terjadi di daerah Jakarta, Banten, dan Jawa Barat dengan melakukan penutupan terhadap gereja dengan alasan-alasan yang tidak jelas.

Sebuah diskusi daring (webinar) yang diadakan oleh Nusantara Institute pada bulan April 2021, Lian Gogali dari direktur Institut Mosintuwu, sebuah lembaga yang bergerak di bidang perdamaian di Poso, menyebutkan bahwa

prasangka sosial yang mengakibatkan konflik horizontal sebagai fenomena kekerasan agama berupa kerusuhan sektarian kristiani-muslim waktu itu hakikatnya dipicu oleh provokasi dan agitasi sebagian kelompok politisi dan fanatikus partai politik tertentu dengan menggunakan isu-isu tentang sentimen-sentimen keagamaan di forum-forum publik. Menurutnya, bentuk provokasi dan agitasi tersebut berkaitan dengan peraihan kekuasaan politik diantara umat yang berbeda agama. Satu sisi, memprovokasi dan mengagitasi para pemeluk agama, jika pemeluk umat A yang berkuasa maka pemeluk umat B akan dimusnahkan atau hidupnya akan dibuat sengsara. Sisi yang lain, diantara mereka sangat agresif menghembuskan dan menyebarkan narasi-narasi kebencian antar kelompok agama, seperti yang terjadi di Pilgub 2017 di Jakarta atau Pilgub 2018 di Sumatra Utara (DWnesia, Tempo.co, 2021).

Analisa Sidney Jones (t.t), banyak pemerhati konflik sosial melakukan kekeliruan ketika melihat kekerasan komunal atau kekerasan etnik di Indonesia selalu dikaitkan dengan fenomena kekerasan agama yang sudah berlangsung lama. Akan tetapi menurutnya terdapat banyak faktor sejarah, politik dan ekonomi yang menjadi akarnya. Misalnya, konflik di Kalimantan Barat pada tahun 1999 dan telah menelan korban ratusan orang tewas, yang episode sebelumnya pada tahun 1997 juga telah memakan korban kematian besar-besaran. Isu yang muncul ke publik Indonesia merupakan konflik agama antara orang Dayak dan beberapa orang Melayu asli melawan kelompok pendatang Madura. Akan tetapi sebenarnya lebih dipicu oleh prasangka social yang berhubungan dengan isu migran, yang didalamnya kental isu persaingan ekonomi dan politik diantara masyarakat yang berseteru. Kemudian, peristiwa konflik yang terjadi di Poso Sulawesi. Episode terburuk

karena telah menelan korban sekitar 300 orang. Lagi-lagi sentimen agama muncul ke publik, karena pertempuran yang terjadi adalah antara masyarakat beragama Kristen dengan masyarakat beragama Muslim. Akan tetapi, sebenarnya konflik ini lebih didasarkan pada perebutan elit lokal atas kekuasaan yang berakhir pada konflik komunal. Begitu juga, konflik komunal yang meletus secara berkala di Lombok, Bali Timur, di Kupang di Timor Barat, di Ujung Pandang, di Jawa Barat dan Jawa Timur kadang selalu dikaitkan dengan isu kekerasan agama sebagai akar persoalannya. Padahal banyak faktor yang menyebabkan konflik social di Indonesia sering terjadi. Bahkan menurut Sidney (t.t.), konflik-konflik komunal yang terjadi di Indonesia selama ini selalu beririsan dengan faktor-faktor dalam bauran politik yang tidak membuat segalanya menjadi lebih mudah diselesaikan.

Fakta bahwa konflik social yang sering terjadi di Indonesia sebenarnya bukan murni dipicu oleh sentimen agama, tetapi awalnya lebih disebabkan oleh faktor-faktor lainnya. Tetap saja banyak pemerhati selalu mengaitkan dengan sentimen agama karena melihat bahwa yang berseteru adalah dua umat beragama yang berbeda. Seperti halnya peristiwa konflik social yang terjadi di Maluku bagian timur bagian dari fenomena konflik antar umat beragama. Maluku bagian timur yang sejak abad enam belas telah menjadi rumah bagi umat Islam, Protestan, dan Katolik dengan menampilkan kehidupan yang damai berubah menjadi lokasi peperangan antaragama. Pada tahun 1999, konflik brutal pecah antara Kristen lokal dan Muslim, dan meningkat menjadi kekerasan komunal skala besar setelah Laskar Jihad, kelompok paramiliter Islam jihad bersenjata yang berbasis di Jawa, mengirim beberapa ribu pejuang ke Maluku. Akibat kekerasan yang meningkat ini, Maluku yang

sebelumnya stabil menjadi lokasi perang antaragama yang sangat memprihatinkan dan menghancurkan kehidupan masyarakatnya (Sumanto Al Qurtuby, 2016, 2012/2013, 135-162; Jacques Bertrand, 57-85).

Informasi-informasi beberapa media televisi, surat kabar, dan media social, baik nasional maupun internasional, fenomena prasangka sosial yang dipicu oleh sentimen agama semakin menguat lagi saat momentum pemilihan gubernur DKI tahun 2017 dan pemilihan Presiden tahun 2019 (Nathanael Gratiyas Sumaktoyo, 2021, 141-164). Prasangka sosial yang melunturkan semangat toleransi antar umat beragama dan sesama umat Islam yang berbeda pemahaman di wilayah bangsa Indonesia yang plural. Ditengah-tengah pransangka social yang selalu dikaitkan dengan isu sentimen agama, Kementerian Agama Republik Indonesia pada tahun 2019 meluncurkan dan mensosialisaikan pengarusutamaan gagasan tentang moderasi beragama untuk tujuan kerukunan antar umat beragama. Menurut Lukman Hakim Saipudin (2019, v-vi), gagasan moderasi ini harus dipahami sebagai komitmen bersama untuk menjaga keseimbangan yang paripurna, di mana setiap warga masyarakat, apa pun suku, etnis, budaya, agama, dan pilihan politiknya harus mau saling mendengarkan satu sama lain, serta saling belajar melatih kemampuan mengelola dan mengatasi perbedaan di antara mereka. Menurutnya, gagasan moderasi beragama ini sangat erat terkait dengan menjaga kebersamaan dengan memiliki sikap tenggang rasa. sebuah warisan leluhur yang mengajarkan generasi anak bangsa untuk saling memahami dan ikut merasakan satu sama lain yang berbeda pandangan.

Gadasan moderasi beragama ini, kemudian dilanjutkan oleh Menteri Agama RI sekarang, Yaqut Cholil Qoumas. Dalam sebuah kegiatan Kader Bangsa Fellowship

Program (KBFP) Angkatan 9 Sekolah Pemimpin Muda Indonesia tahun 2021 melalui daring, Yaqut Cholil Qoumas (Kemenag.go.id., 2021), telah menyampaikan pentingnya toleransi dan moderasi dalam memperkuat negara bangsa. Menurutnya, moderasi dan toleransi secara substansi memiliki kesamaan untuk tujuan mengarahkan perilaku umat beragama di Indonesia untuk berada di jalur tengah atau moderat. Dalam konteks inilah, gagasan moderasi agama harus masuk pada ranah Pendidikan bahkan menjadi bagian dari sistem pendidikan, sebagaimana dikatakan oleh Menteri Agama RI Yaqut Cholil Qoumas dan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim (w.w.w. Republika.co.id., 2021). Satu sisi, pengarusutamaan gagasan moderasi beragama ini semakin mendapat porsi dalam ranah Pendidikan. Tetapi sisi yang lain, masih kuatnya prasangka sosial Sebagian umat beragama saat ini terhadap gagasan moderasi beragama akan menjadi problematika tersendiri dalam merealisasikannya di dunia Pendidikan dan kerukunan antar umat beragama di Indonesia yang plural.

Metodologi

Kajian tentang prasangka sosial dan problematika pendidikan moderasi beragama di Indonesia ini merupakan hasil kajian dengan menggunakan pendekatan metode penelitian kritis. Metode penelitian kritis ini sebagai upaya untuk mengungkap, mengkritik dan menjelaskan tentang narasi-narasi yang terkait dengan prasangka sosial dan problematika pendidikan moderasi beragama di Indonesia dengan menggunakan perkembangan teknologi dan penggunaan sistem informasi yang dilakukan oleh Sebagian organisasi dan masyarakat, baik atas nama efisiensi, rasionalisasi, kemajuan, meningkatkan kontrol,

dominasi, penindasan, dan menghasilkan konsekuensi yang merugikan secara sosial. Mengikuti naskah ilmu sosial kritis, penelitian kritis ini berupaya menyelidiki narasi-narasi yang terkait dengan prasangka sosial dan problematika pendidikan moderasi beragama di Indonesia dengan tujuan untuk memahami dan menjelaskan berbagai konsekuensi manusia dan sosial yang kompleks. Dengan kata lain, mengkaji lebih dalam pemahaman mengenai narasi-narasi yang terkait dengan isu prasangka sosial dan problematika pendidikan moderasi beragama di Indonesia, baik diinformasikan secara structural ataupun kultural masyarakat melalui media-media teknologi informasi. Penelitian kritis ini berusaha untuk mengubah kesadaran dan meminimalisir konsekuensi sosial yang merugikan (lihat: Dubravka Cecez-Kecmanovic, 2007, 1446-1457).

Adapun menurut Fay (1987, 27), penelitian kritis selalu berusaha untuk mencapai perubahan sosial emansipatoris dengan menjelaskan tatanan sosial sedemikian rupa sehingga menjadi katalisnya tersendiri yang mengarah pada transformasi tatanan sosial tersebut. Oleh karena itu, penelitian kritis tentang prasangka sosial dan problematika pendidikan moderasi beragama di Indonesia ini diharapkan menjadi katalis untuk perubahan dalam membantu dan memberikan argumentasi ilmiah kepada berbagai kelompok dan pemangku kepentingan yang terkait dengan isu moderasi beragama.

Pembahasan

Prasangka Sosial dengan Praktek Agama

Menteri Agama Republik Indonesia, Yaqut Cholil Qoumas (Kemenag.go.id., 2021), mengatakan bahwa keberagaman sehari-hari di Indonesia terdapat fakta yang menunjukkan sebagian orang yang memaknai agama itu di satu sisi sangat

ekstrem dengan tidak mentolelir orang yang berbeda keyakinan agama dengannya. Bahkan dengan jamak, kita temukan orang dengan mudah mengatakan bahwa orang yang berbeda dengannya itu dianggap musuh dan oleh karena itu harus diperangi secara ideologi dan politik. Di sisi lain, ada juga sekelompok orang yang skeptis dengan agama dan merasa tidak perlu lagi ada agama. Kelompok ini memandang agama sebagai jalan buntu daripada jalan keluar. Menurutnya, situasi keberagaman sehari-hari di Indonesia seperti ini dibutuhkan satu gagasan yang dapat menjadi katalis positif bagi terjadinya kerukunan umat beragama. Yaqut Cholil Qoumas, menegaskan bahwa pengarusutamaan gagasan Moderasi Beragama bisa mencari titik temu antara kelompok yang sangat ekstrem dan kelompok yang sangat lunak tersebut. Keduanya dipertemukan di tengah sehingga mereka merasa bahwa agama itu sangat penting dan perlu. Baginya, seorang umat beragama boleh berkeyakinan kuat dan merasa agamanya paling benar. Di saat yang sama ia mesti menghargai keyakinan orang yang berbeda agama dan keyakinan dengannya.

Satu sisi, pernyataan Menteri Agama RI ini sangat positif untuk tujuan perubahan pola keberagaman di Indonesia ke depan. Akan tetapi, pada sisi yang lain masih terdapat prasangka social dari kelompok-kelompok beragama tertentu terhadap wacana moderasi beragama yang telah digagas oleh Kemenag RI tersebut. Prasangka social ini akan menjadi problematika tersendiri dalam konteks penerimaan atau penolakan kelompok-kelompok tertentu dan sebagian umat beragama di Indonesia terhadap gagasan moderasi beragama yang telah dikembangkan oleh Kemenag RI.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu, hubungan prasangka social dengan praktek keberagamaan sangat berpengaruh terhadap penerimaan atau penolakan terhadap gagasan-gagasan yang muncul dari masing-masing kelompok beragama. Situasi seperti ini telah menjadi problem keberagamaan di hampir setiap negara. Faktanya, situasi keberagamaan yang dipicu oleh prasangka social dapat melahirkan perilaku intoleransi, saling menghukumi bahkan jauhnya berujung kepada konflik komunal diantara kelompok-kelompok beragama.

Bukti kuatnya hubungan antara agama dan prasangka sosial dapat dilihat dari hasil penelitian tentang hubungan ras di Amerika. Penelitian-penelitian telah menunjukkan bahwa identifikasi dan partisipasi agama setidaknya kadang-kadang dapat dikaitkan dengan peningkatan prasangka social terhadap berbagai kelompok luar (Altemeyer, 2003; Batson et al., 1993; Rowatt, LaBouff, Johnson, Froese, & Tsang, 2009). Berdasarkan hasil penelitian lain ditemukan di AS bahwa sejak Civil Rights Act tahun 1964 dideklarasikan telah menemukan korelasi yang signifikan antara tingkat partisipasi dan identifikasi agama dengan tingkat prasangka rasial, baik terbuka maupun terselubung. (Hall et al., 2010). Penelitian Johnson, Rowatt, & LaBouff (2010: 119-126), telah menemukan praktek dari konsep agama yang telah meningkatkan sikap prasangka. Misalnya, penggunaan identitas mahasiswa sarjana AS dengan kata-kata Kristen secara subliminal telah meningkatkan prasangka rasial terselubung dan pengaruh negatif terhadap orang Afrika-Amerika. Bahkan menurut Johnson, Rowatt, & LaBouff (2012: 154-168), subliminal agama di antara mahasiswa sarjana AS juga telah menyebabkan peningkatan penghinaan terhadap kelompok luar yang melanggar nilai dan peningkatan favoritisme

dalam kelompok. Studi-studi ini menunjukkan bahwa adanya hubungan antara praktek agama dengan beberapa kasus yang memperlihatkan adanya peningkatan prasangka sosial.

Penelitian Clobert, M., Saroglou, V., Hwang, K. K., Soong, W. L. (2014: 1515–1533) yang berfokus pada hubungan praktek agama dan prasangka di Asia Timur telah menunjukkan pola sikap antarkelompok yang berbeda. Hubungan perilaku beragama ini dikaitkan dengan toleransi antarkelompok. Keberagamaan di Asia Timur, hubungan antara individu-individu di Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan telah ditemukan pola yang diprediksi semakin berkurangnya tingkat prasangka terhadap banyak kelompok sasaran dibandingkan dengan individu-individu yang tidak beragama, semisal berkurangnya prasangka etnis, berkurangnya prasangka terhadap gay dan atheis, dan bahkan mengurangnya prasangka terhadap pemeluk agama lain. Bahkan menurut Clobert & Saroglou (2013: 459–466), sebuah penelitian menunjukkan bahwa secara supraliminal penggunaan priming agama Kristen di Belgia dengan gambar biksu Buddha dalam meditasi ditemukan telah mengurangi prasangka implisit terhadap outgroup etnis. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan priming antaragama dapat mempengaruhi sikap antarkelompok dengan menanamkan simbol-simbol ajaran agama yang positif dan mampu mengedukasi para pemeluk agama untuk menerima nilai-nilai keterbukaan dan toleransi.

Secara teoritik prasangka sosial ini dapat mempengaruhi persepsi seseorang atau kelompok tertentu terhadap orang lain sebagai *outgroup*, termasuk menyikapi gagasan agama dan keberagamaan. Dominic Abrams (2010: 3), telah mendefinisikan bahwa prasangka merupakan perilaku bias yang merendahkan orang karena keanggotaan

yang dirasakan dari suatu kelompok sosial tertentu. Literatur psikologi sosial menyoroti empat bidang dalam mendeskripsikan tentang prasangka ini, yakni: 1) Konteks antarkelompok. Prasangka yang mengacu pada cara orang-orang dalam kelompok sosial yang berbeda Ketika memandang anggota kelompok yang lain. Persepsi yang berbeda antar kelompok berhubungan dengan perbedaan kekuasaan yang dialami. Perbedaan kekuasaan ini akan melahirkan Sebagian kelompok yang tidak memiliki atau jauh dari kekuasaan muncul persepsi merasa terancam oleh orang lain yang memiliki atau dekat dengan kekuasaan. Persepsi antarkelompok seperti ini akan memberikan stimulan kepada orang untuk mengembangkan prasangka. 2) Dasar psikologis prasangka. Hal ini termasuk nilai-nilai alami yang terdapat di masyarakat untuk mempertahankan identitas dan norma sosialnya. Persepsi *ingroup* dan *outgroup* sosial yang dipertahankan oleh suatu anggota kelompok masyarakat dapat melahirkan prasangka yang semakin berkembang dan bertahan lama. Identitas dan norma sosial sebagai nilai kunci suatu masyarakat Ketika memandang kelompok lain yang berbeda atau bertentangan akan melahirkan prasangka negative bahkan perilaku mendiskriminasi orang lain.

Dominic Abrams (2010: 4), menggambarkan bahwa manifestasi prasangka dapat muncul dalam pelbagai cara dan ungkapan. Misalnya dalam bentuk ungkapan stereotip negatif karena terkait dengan perasaan ketakutan adanya ancaman yang ditimbulkan oleh kelompok lain. Beberapa stereotip yang muncul selalu merendahkan secara personal maupun kelompok. Stereotip yang berbeda mungkin dapat membangkitkan respons emosional yang berbeda. Ini termasuk perilaku menghina atau permusuhan terbuka. Penggunaan bahasa, perilaku, Begitupun reaksi emosional

orang dan gambaran melalui media sosial dapat mencerminkan prasangka juga.

Worchel, Cooper, Goethals, dan Olson (2000), telah mendefinisikan prasangka dengan dibatasi sebagai sifat negatif yang tidak dapat dibenarkan terhadap suatu kelompok dan individu anggotanya. Prasangka telah diposisikan sebagai perilaku negatif yang dapat mengarahkan kelompok pada individu berdasarkan pada keterbatasan atau kesalahan informasi tentang kelompok tertentu. Dampak dari prasangka sebagai sesuatu yang bersifat emosional akan mudah sekali menjadi motivator munculnya ledakan sosial. David O. Sears, Jonathan L. Freedman, L. Anne Peplau (1991), telah mendefinisikan prasangka sosial sebagai penilaian terhadap kelompok atau seorang individu yang didasarkan pada keanggotaan kelompok tersebut. Artinya prasangka sosial ditujukan pada orang atau kelompok orang yang berbeda dengannya atau kelompoknya. Prasangka sosial memiliki kualitas suka dan tidak suka pada objek yang diprasangkainya, dan kondisi ini akan mempengaruhi tindakan atau perilaku seseorang yang berprasangka tersebut. Kartini (1981) mendefinisikan prasangka sebagai penilaian yang terlampau tergesa-gesa yang didasarkan kepada generalisasi yang terlalu cepat, sifatnya berat sebelah dan diikuti tindakan menyederhanakan suatu realitas atau peristiwa tertentu. Papalia dan Sally (1985) menyebutkan bahwa prasangka sosial merupakan sikap negatif yang ditujukan pada orang lain yang berbeda dengan kelompoknya tanpa adanya alasan yang mendasar pada pribadi orang tersebut. Prasangka sosial tersebut dapat lahir dari adanya persaingan yang berlebihan antar dua individu atau kelompok yang mengakibatkan saling memunculkan stigma dan streatip diantara kelompok tersebut.

Truna dan Zakaria (t.t) mengutip pernyataan Allport dalam Scarr dan Vanden Zanden (1984) menguraikan bahwa prasangka sosial merupakan perasaan negative terhadap seseorang atau kelompok tertentu. Suatu sikap dimanifestasikan dalam perilaku permusuhan dan kebencian dari kelompok tertentu kepada kelompok lain tanpa adanya alasan yang objektif. Merujuk pada teori interaksi simbolik Herbert Blumer, terdapat empat tipe perasaan yang bisa melahirkan prasangka pada kelompok dominan: 1) Perasaan superioritas; 2) kelompok minoritas secara inheren merasa berbeda dan asing; 3) perasaan berhak atas klaim kekuasaan, keistimewaan dan status, dan; 4) rasa takut dan curiga terhadap kelompok minoritas menyembunyikan rencana-rencana atas kekuasaan, keistimewaan dan status kelompok dominan. Parekh (2000), prasangka sosial disejajarkan dengan istilah fitnah komunal yang diarahkan kepada satu komunitas tertentu pemilik latar belakang budaya, ras dan keagamaan yang khas.

Praktek agama yang diikuti prasangka sosial yang kuat antar kelompok agama telah melahirkan pelbagai problem keberagaman dan kemanusiaan di masyarakat. Di Indonesia, tidak sedikit meletus peristiwa-peristiwa konflik kemanusiaan yang menyedihkan dan memilukan akibat tajamnya prasangka social yang berlatar sentimen agama dan etnis dari kelompok-kelompok tertentu. Kajian Pangabean (2012:147-169), berdasarkan database yang dibuat dengan menggunakan laporan surat kabar lokal semenjak tahun 1999 hingga 2003 menunjukkan adanya tren dan pola kekerasan kolektif di Indonesia. Temuan menunjukkan bahwa kekerasan antaragama, terutama antara Kristen dan Muslim telah menyebabkan kehancuran kehidupan terbesar di Indonesia sejak tahun 1998. Disusul

dengan kekerasan antar etnis. Bahkan sejak tahun 1998, perselisihan Muslim-Kristen semakin sering terjadi dan lebih mematikan. Mulai dari kasus kekerasan yang melibatkan Kristen dan Muslim di Maluku dan Maluku Utara yang berlangsung 1999-2002. Gelombang publikasi surat kabar telah menyebut konflik tersebut dipicu oleh prasangka yang lahir dari sentimen agama. Satu sama lain yang berseteru telah menjadikan agama untuk membenaran melakukan kekerasan, instrument mobilisasi atau faktor lain yang menyebabkan terjadinya.

Sidney Jhon (t.t), melihat peristiwa konflik yang lahir dari prasangka soial yang melibatkan sentiment agama berwal dari persoalan demografi dan perpindahan penduduk. Perubahan keseimbangan penduduk di antara kelompok etnis dan agama yang berbeda telah menyebabkan jenis ketegangan tertentu. Prasangka social muncul karena satu kelompok merasa bahwa mereka dikepung oleh kelompok lain. Di Ambon ada proporsi yang cukup seimbang antara Ambon-Kristen dan Ambon-Muslim dengan metode budaya tradisional untuk resolusi konflik. Pada tahun 70-an dan 80-an, terjadi migrasi besar-besaran ke daerah-daerah Muslim dari Sulawesi dan tempat lain. Akibatnya, keseimbangan penduduk bergeser, tetapi pekerjaan yang secara tradisional menjadi milik elit Kristen mulai beralih ke beberapa pendatang baru yang kebetulan beragama Islam dan itu menyebabkan situasi di mana orang Kristen merasa terancam. Hal itu menjadi salah satu faktor penentu bagaimana reaksi umat Kristiani terhadap sejumlah peristiwa yang terjadi pada 1998 dan 1999. Dalam pengamatan Sidney Jhon, persoalan ini menyebabkan terjadinya persaingan untuk tanah, sumber daya, dan akhirnya untuk kekuasaan semakin tajam terjadi di antara

kelompok yang berbeda. Bahkan berujung kepada konflik komunal berlatar sentimen agama dan etnis.

Contoh lain, peristiwa konflik di Indonesia disebabkan prasangka social yang dipicu oleh sentimen agama juga terjadi semenjak tahun 2017 sampai sekarang, khususnya yang terjadi pada momentum pemilihan Gubernur DKI (2017) dan Pemilihan Presiden (2019). Prasangka social yang menyebabkan lahirnya perilaku-perilaku intoleransi, kekerasan verbal dan bahkan kekerasan fisik atas nama agama. Menag RI, Yaqut Cholil Qaumas (2021) telah menyoroti intoleransi yang meningkat menjelang kontestasi pemilihan gubernur (pilgub) hingga pemilihan presiden (pilpres). Qaumas menyinggung gelaran pilgub DKI hingga pilpres adanya prasangka social yang dipicu oleh sentimen agama oleh kelompok-kelompok tertentu. Pemahaman *ingroup* dan *outgroup* dalam narasi-narasi yang dipublikasi antar kelompok di media social menunjukkan kuatnya prasangka social yang melibatkan isu-isu sentimen agama.

Hasil penelitian Mahadika dan Sardini (2019) berkaitan dengan prasangka social yang dilandasi sentimen agama terjadi juga dalam momentum pemilihan Gubernur DKI merupakan fenomena yang dapat disaksikan dengan jelas. Prasangka sosial yang dipicu oleh penggunaan Isu SARA dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Tahun 2017 Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA) merupakan pandangan ataupun tindakan yang didasari dengan pikiran sentimen mengenai identitas diri menyangkut keturunan, agama, kebangsaan atau kesukuan golongan. Isu SARA selalu menjadi hal yang sensitif di Indonesia, terlebih pada saat menjelang Pemilu. Kampanye isu SARA kerap muncul pada saat menjelang pemilu dan berpotensi menimbulkan konflik sosial. Pada dasarnya, isu SARA digunakan untuk menyerang lawan, merendahkan

orang lain, bersifat menekan dan menurunkan elektabilitas. Di Indonesia isu Suku Agama Ras dan Antargolongan dan hal-hal yang berhubungan dengan agama memiliki daya tarik lebih untuk dijadikan komoditas untuk menggiring opini masyarakat, ditambah dengan kondisi dimana meningkatnya emotional investment yang menciptakan sentiment terhadap orang lain dan maraknya aksi-aksi yang mengarah pada penebaran ujaran kebencian yang berdampak destruktif bagi kondisi sosial masyarakat di Indonesia.

Secara empiris, sebagian peristiwa konflik komunal di Indonesia lahir dari kompetisi antar kelompok. Myres (2010) menyatakan kompetisi tersebut merupakan suatu sumber frustrasi utama yang dapat memperkuat prasangka. Prasangka yang menyebabkan penilaian negatif yang telah dimiliki sebelumnya terhadap satu kelompok dan masing-masing anggota kelompoknya. Ketika dua kelompok bersaing untuk pekerjaan, tempat tinggal, dan status social. Pemenuhan tujuan dari satu kelompok dapat menjadi sumber frustrasi bagi kelompok lain. Persaingan satu sama lain dengan tujuan tertentu dari masing-masing individu dari kelompok yang berbeda dapat menimbulkan konflik langsung antar kelompok. Hal ini yang menjadi salah satu faktor prasangka social semakin meningkat diantara kelompok yang sedang bersaing tersebut. Baron & Byrne (2004) menyatakan bahwa ketika kelompok bersaing satu sama lain untuk memperoleh sumber daya yang berharga seperti, pekerjaan, perumahan, kesempatan dan pendidikan, maka mereka akan memandang satu sama lain dengan pandangan negatif yang terus meningkat. Menurut teori konflik realistik, prasangka timbul karena kompetisi sosial yang berbeda untuk meraih kesempatan atau sumber daya yang terbatas. Menurut Simpson & Yinger, (1965),

persaingan memperebutkan sumberdaya yang terbatas seringkali berujung pada timbulnya konflik antara pihak-pihak yang berkompetisi. Konflik antar kelompok yang membesar akan menyebarkan prasangka dan diskriminasi. Prasangka sebagai hasil dari konflik karena konsekuensi munculnya sikap permusuhan antar kelompok. Baron & Byrne (2004), prasangka yang muncul karena kompetisi antar kelompok sosial untuk memperoleh kesempatan atau komoditas yang berharga dapat berkembang menjadi kebencian dan pemicu lahirnya emosi.

Alfian (2013), dalam konteks masyarakat Muslim, khususnya di Jawa, ada dua kelompok Muslim yang diantara keduanya seringkali terjadi ketegangan yang diakibatkan adanya prasangka sosial antar kelompok, baik dalam bentuk konflik terbuka maupun yang bersifat laten. Kelompok Muslim tersebut adalah kelompok Muslim puritan dan kelompok Muslim kultural. Muslim puritan adalah kelompok Muslim yang menganut faham puritanisme Islam, yaitu suatu faham yang berusaha untuk memurnikan ajaran Islam dari pengaruh luar (termasuk budaya) baik dalam bentuk keyakinan, pemikiran maupun praktik keagamaan. Sedangkan Muslim kultural adalah kelompok Muslim yang memandang budaya sebagai sarana berlangsungnya transformasi agama. Bagi sebagian masyarakat Muslim di Jawa, ajaran Islam telah menjadi bagian dari budaya mereka. Perilaku keagamaan Muslim di Jawa banyak diekspresikan melalui tradisi yang telah membudaya, selain perilaku formal agama atau ibadah.

Liliweri (2005) menyebutkan bahwa salah satu pemicu terjadinya konflik dan intern umat beragama adalah karena umat agama atau kelompok agama tertentu tidak dapat memahami secara benar tentang umat agama atau kelompok agama yang lain, yang memiliki latar belakang

ideologi yang berbeda. Hal itu telah mempengaruhi cara berfikir, bersikap, dan bertindak yang berbeda pula dengan dirinya. Karena ketidakpahaman itulah, maka banyak diantara umat beragama yang tidak tahu bagaimana seharusnya hidup dalam masyarakat yang majemuk, dengan multi agama, multietnik dan multikultur. Akibatnya hubungan antar umat beragama sering diwarnai dengan konflik, yang diakibatkan oleh adanya prasangka antar dan intern umat beragama. Dalam perspektif psikologi sosial, konflik antar dan intern umat beragama yang diakibatkan oleh prasangka berupa aksi kekerasan, permusuhan, dan ketidakadilan berasal dari adanya antagonisme kelompok.

Menurut Taylor (2009:210), antagonisme kelompok tampak ketika anggota satu kelompok (*in group*) menunjukkan sikap dan perilaku negatif terhadap anggota kelompok lain (*out group*). Antagonisme kelompok memiliki tiga komponen yang saling terkait yaitu stereotip, prasangka, dan diskriminasi. Sarwono dan Meinarno (2009:226) menyatakan bahwa prasangka merupakan salah satu aspek paling destruktif dari perilaku manusia dan sering menimbulkan tindakan yang mengerikan. Prasangka adalah sebuah sikap yang biasanya bersifat negative yang ditujukan bagi anggota-anggota beberapa kelompok, yang didasarkan pada keanggotaannya dalam kelompok. Newcom (1985: 561), telah mendefinisikan prasangka sebagai sikap yang tidak baik dan dapat dianggap sebagai suatu predisposisi untuk mempersepsi, berfikir, merasa dan bertindak dengan cara-cara yang menentang orang-orang lain, terutama sebagai anggota-anggota kelompok. Prasangka ini menurut Brown (2005: 12) merupakan sikap sosial atau keyakinan kognitif yang bersifat merendahkan, pengekpresian afek negatif, atau tindakan permusuhan atau diskriminatif terhadap anggota suatu kelompok yang

dihubungkan dengan keanggotaannya dalam kelompok tersebut. Beberapa definisi prasangka yang dikemukakan oleh para ahli tersebut.

Berdasarkan paparan di atas, maka prasangka sosial memiliki pengaruh kuat dalam membentuk pola keberagamaan atau praktek agama para pemeluknya. Pengaruhnya sangat negatif, jika prasangka sosial tersebut melahirkan sikap superioritas, memperlebar jurang perbedaaan, sikap agresif kepada kelompok yang berbeda pandangan, menguatnya klaim paling merasa benar sendiri, dan perasaan curiga berlebihan kepada kelompok yang berbeda. Bahkan pengaruh prasangka sosial hubungannya dengan praktek agama sangat berbahaya ledakan konfliknya bagi keselamatan dan kedamaian dalam kehidupan masyarakat. Hasil kajian Kmeneag RI (2019), menemukan bahwa daya rusak konflik yang berlatar belakang perbedaan klaim kebenaran tafsir agama sangat dahsyat, mengingat watak agama yang selalu menyentuh relung emosi terjauh di dalam setiap jiwa manusia. Padahal, prasangka sosial tidak jarang lahir dari perbedaan yang sederhana yakni perebutan sebatas kebenaran tafsir agama yang dihasilkan oleh manusia yang terbatas, bukan kebenaran hakiki yang merupakan tafsir tunggal yang paling benar dan hanya dimiliki oleh Tuhan Yang Maha Benar.

Agama sebagai ajaran *rahmatan lil 'alamin* semestinya mampu mendamaikan dan menjauhkan dari konflik diantara kelompok-kelompok beragama. Akan tetapi, kuatnya prasangka sosial diantara kelompok-kelompok beragama justru menghilangkan fungsi solidaritas dan integrasi sosial dalam ajaran agama. Kemenag RI (2019) menegaskan, alih-alih ajaran agama mampu menuntun pada kehidupan yang tentram dan menenteramkan para pemeluknya. Munculnya kelompok-kelompok fanatisme

ekstrem yang mengklaim kebenaran tafsir agamanya paling benar tidak jarang menyebabkan permusuhan dan pertengkaran di antara kelompok-kelompok tersebut. Prasangka sosial yang menyebabkan konflik berlatar agama ini dapat menimpa berbagai kelompok atau mazhab dalam satu agama yang sama (sektarian atau intra-agama), atau terjadi pada beragam kelompok dalam agama-agama yang berbeda (komunal atau antaragama). Biasanya, awal terjadinya konflik berlatar agama ini disulut oleh prasangka sosial antar kelompok karena sikap saling menyalahkan tafsir dan paham keagamaan di antara mereka, merasa benar sendiri, serta tidak membuka diri pada tafsir dan pandangan keagamaan orang lain. Kondisi seperti ini tentu akan mengganggu kerukunan umat beragama di Indonesia yang multi etnis, suku, budaya, bahasa, dan agama. Dalam konteks inilah maka dibutuhkan sikap dan pemikiran beragama yang moderat.

Problematika dan Pentingnya Pendidikan Moderasi Beragama di Indonesia

Menurut Mustadlo (2018, 297–306), pendidikan merupakan cara yang tepat untuk mewujudkan gagasan moderasi beragama. Pendidikan Mengutip Goodlad, Murtadlo menyebutkan bahwa pendidikan mempunyai dua fungsi, pertama, tujuan personal (*private goals*), yaitu pendidikan untuk mengembangkan kompetensi peserta didik yang meliputi vokasi, sosial, intelektual, dan personal; kedua, tujuan kolektif (*public goals*), yaitu tujuan yang terikat dengan kepentingan kolektivitas masyarakat tertentu, seperti negara.

Masih menurut Murtadlo (2017, 75–93), pendidikan dalam konteks kolektif kaitannya dengan kepentingan negara melayani dua kepentingan utama. *Pertama*, pembangunan kewarganegaraan (*citizenship*) yang meliputi tempat sosialisasi, transmisi kebudayaan, dan pengembangan identitas individu. *Kedua*, pendidikan kompetensi warga negara secara standar dan memberikan surat pengakuan (sertifikat) yang dibutuhkan dalam konteks administrasi publik. Pemikiran pendidikan moderasi beragama hadir untuk melayani kepentingan pembangunan karakter kewarganegaraan (*citizenship*) manusia Indonesia. Untuk itu, pendidikan moderasi beragama linier dengan tujuan pendidikan nasional, yaitu pembentukan karakter manusia Indonesia. Pendidikan karakter ini merupakan usaha sadar untuk mewujudkan kebajikan, yaitu kualitas kemanusiaan yang baik secara objektif, bukan hanya baik bagi individu, tetapi juga baik untuk masyarakat secara keseluruhan.

Menurut David Elkind dan Freddy Sweet (2004), pendidikan karakter juga merupakan upaya yang sadar untuk membantu orang memahami, peduli, dan bertindak

berdasarkan nilai-nilai etika inti. Jenis karakter yang dapat menilai apa yang benar, peduli tentang apa yang benar, dan kemudian melakukan apa yang diyakini benar, bahkan diharapkan mampu menghadapi tekanan dari luar dan godaan dari dalam memegang sesuatu yang dianggap benar.

Menurut Murtadlo (2017), pendidikan karakter di Indonesia telah menjadi amanah Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 Kementerian Pendidikan Nasional mengidentifikasi terdapat 18 nilai dalam pengembangan pendidikan karakter. Pada tahun 2016 direvisi menjadi lima nilai utama pendidikan karakter, yaitu religiusitas, nasionalisme, kemandirian, gotong royong, dan integritas. Menurut Murtadlo, karakter moderat diharapkan dijiwai dan menjiwai kelima nilai karakter tersebut. Karakter moderat diusung oleh Kementerian Agama (2019) dalam konsep moderasi beragama yang berisi empat nilai, yaitu terkait relasi agama dan negara (komitmen kebangsaan), relasi antarumat beragama (toleransi), ekspresi keagamaan yang ramah (nirkekerasan), relasi agama, dan budaya (arif terhadap budaya lokal). Nilai-nilai ini kemungkinan masih dapat berkembang sesuai situasi dan kondisi mengingat fungsi agama sebagai rahmat bagi semesta (*rahmatan lil alamin*).

Dalam konteks relasi agama dan negara, moderasi beragama merupakan pemahaman keagamaan yang fungsional dengan ide kebangsaan. Pendidikan moderasi beragama dalam konteks ini diharapkan mampu mengembangkan rasa cinta dan bangga terhadap tanah air, kelekatan psikologis, dan komitmen terhadap negara kepada warga negara sebagai peserta didik. Saat ini, pendidikan moderasi beragama dihadapkan pada permasalahan: kuatnya prasangka sosial yang terbangun dari Sebagian kelompok keberagamaan yang telah

berdampak kepada adanya pemikiran sebagian anak muda yang ingin mengganti sistem pemerintahan, mengganti dasar negara, membiarkan rasa persatuan Indonesia terpecah, mendukung ide separatisme, dan acuh tak acuh terhadap nasib bangsa. Untuk menjawab masalah ini, pendidikan moderasi beragama perlu lebih diarahkan untuk memahami konstitusi, pentingnya bela negara, realitas pluralisme (multikulturalisme) bangsa, dan bagaimana memajukan bangsa. Dalam konteks relasi dengan negara, moderasi beragama menghendaki sikap penerimaan warga negara sebagai peserta didik terhadap pluralitas bangsa dari sisi kesukuan, agama, bahasa, dan adat (lihat. Murtadlo, 2015, 45-60).

Gagasan moderasi beragama muncul bersamaan semakin menguatnya indikasi-indikasi prasangka sosial dari beberapa kelompok keberagamaan tertentu yang memiliki identitas khas. Satu sama lain saling melakukan *truth claim*. Hasil kajian Kemenag RI (2019), semangat moderasi beragama adalah untuk mencari titik temu dua kutub ekstrem dalam beragama. Di satu sisi, ada pemeluk agama yang ekstrem meyakini mutlak kebenaran satu tafsir teks agama, seraya menganggap sesat penafsir selainnya. Kelompok ini biasa disebut *ultra-konservatif*. Di sisi lain, ada juga umat beragama yang ekstrem mendewakan akal hingga mengabaikan kesucian agama, atau mengorbankan kepercayaan dasar ajaran agamanya demi toleransi yang tidak pada tempatnya kepada pemeluk agama lain. Mereka biasa disebut *ekstrem liberal*. Diantara dua kutub ini satu sama lain saling berseteru yang melibatkan pelbagai pengikut fanatiknya.

Dindin Solahudin (2020:10), memandang bahwa moderasi bermakna kemoderatan bukan memoderatkan (moderatisasi). Moderasi Islam bermakna wajah

kemoderatan Islam dan moderasi beragama berarti kemoderatan praktik beragama. Moderatisasi Islam tidak perlu dilakukan karena Islam sudah moderat adanya, sementara moderatisasi beragama perlu dilakukan ditengah-tengah adanya praktik beragama yang ekstrem. Lawan moderasi bukan radikalitas sebagaimana pemahaman public telah dimaknai sebagai kekerasan, melainkan dengan ekstremitas. Maka dari itu, moderasi tidak bisa secara langsung diperhadapkan dengan radikalitas, tetap dengan ekstremitas dalam segala bentuknya. Dengan kata lain, pada satu sisi ada moderasi beragama dan pada lain sisi ada ekstremitas beragama. Lebih lanjut Dindin Solahudin (2020: 16), mengatakan ekstremitas beragama ini terbagi menjad dua, yakni: ekstrem kanan dan ekstrem kiri. Ekstrem kanan yang berlebihan beragama dan ekstrem kiri yang berkekuarang dalam beragama selalu beresiko pada sikap ekstrem lanjutan. Kaum ekstrem kanan cenderung terjebak pada sikap pengkafiran, yakni gampang menuding orang yang bermaksiat dan berdosa sebagai kafir, tidak beriman atau zindik. Sebaliknya, kaum ekstrem kiri cenderung gampang membuat stigma orang beribadah secara maksimal sebagai radikl ekstrem. Kedua kelompok ekstrem tersebut selalu mencederai moderasi ibadah.

Kemenag RI (2019: 16-17), telah menyamakan istilah moderasi denngan kata *wasath* atau *wasathiyah*, yang memiliki padanan makna dengan kata *tawassuth* (tengah-tengah), *i'tidal* (adil), dan *tawazun* (berimbang). Orang yang menerapkan prinsip *wasathiyah* bisa disebut *wasith*. Dalam bahasa Arab, kata *wasathiyah* diartikan sebagai “pilihan terbaik”. Apa pun kata yang dipakai, semuanya menyiratkan satu makna yang sama, yakni adil, yang dalam konteks ini berarti memilih posisi jalan tengah di antara berbagai

pilihan ekstrem. Kata *wasith* bahkan sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi kata 'wasit' yang memiliki tiga pengertian, yaitu: 1) penengah, perantara; 2) pelera (pemisah, pendamai) antara yang berselisih; dan 3) pemimpin di pertandingan. Menurut para pakar bahasa Arab, kata *wasath* itu juga memiliki arti "segala yang baik sesuai dengan objeknya". Adapun lawan kata moderasi adalah berlebihan, atau *tatharruf* dalam bahasa Arab, yang mengandung makna *extreme*, *radical*, dan *excessive* dalam bahasa Inggris. Kata *extreme* juga bisa berarti "berbuat keterlaluan. Dalam bahasa Arab, setidaknya ada dua kata yang maknanya sama dengan kata *extreme*, yaitu *al-guluw* dan *tasyaddud*. Meski kata *tasyaddud* secara harfiah tidak disebut dalam Alquran, namun turunannya dapat ditemukan dalam bentuk kata lain, misalnya kata *syadid*, *syidad*, dan *asyadd*. Ketiga kata ini memang sebatas menunjuk kepada kata dasarnya saja, yang berarti keras dan berlebihan. Dalam konteks beragama, pengertian "keras dan berlebihan" ini dapat diterapkan untuk merujuk pada orang yang bersikap ekstrem, serta melebihi batas dan ketentuan syariat agama.

Dalam berbagai kajian, moderasi beragama dalam perspektif Islam (*wasathiyat Islam*), sering diterjemahkan sebagai '*justly-balanced Islam*', '*the middle path*' atau '*the middle way*' Islam, di mana Islam berfungsi memediasi dan sebagai penyeimbang. Istilah-istilah ini menunjukkan pentingnya keadilan dan keseimbangan serta jalan tengah untuk tidak terjebak pada ekstremitas dalam beragama. Selama ini konsep *wasathiyat* juga dipahami dengan merefleksikan prinsip moderat (*tawassuth*), toleran (*tasamuh*), seimbang (*tawazun*), dan adil (*i'tidal*). Dengan demikian, istilah ummatan *wasathan* sering juga disebut sebagai '*a just people*' atau '*a just community*', yaitu

masyarakat atau komunitas yang adil (Kemenag RI, 2019: 26).

Moderasi beragama harus dipahami sebagai sikap beragama yang seimbang antara pengamalan agama sendiri (*eksklusif*) dan penghormatan kepada praktik beragama orang lain yang berbeda keyakinan (*inklusif*). Keseimbangan atau jalan tengah dalam praktik beragama ini niscaya akan menghindarkan kita dari sikap ekstrem berlebihan, fanatik dan sikap revolusioner dalam beragama. Seperti telah diisyaratkan sebelumnya, moderasi beragama merupakan solusi atas hadirnya dua kutub ekstrem dalam beragama, kutub ultra-konservatif atau ekstrem kanan di satu sisi, dan liberal atau ekstrem kiri di sisi lain. Moderasi beragama sesungguhnya merupakan kunci terciptanya toleransi dan kerukunan, baik di tingkat lokal, nasional, maupun global. Pilihan pada moderasi dengan menolak ekstremisme dan liberalisme dalam beragama adalah kunci keseimbangan, demi terpeliharanya peradaban dan terciptanya perdamaian. Dengan cara inilah masing-masing umat beragama dapat memperlakukan orang lain secara terhormat, menerima perbedaan, serta hidup bersama dalam damai dan harmoni. Dalam masyarakat multikultural seperti Indonesia, moderasi beragama bisa jadi bukan pilihan, melainkan keharusan (Kemenag RI, 2019: 18).

Dindin Solahudin (2020: 20-21), menyebutkan bahwa moderasi beragama meliputi empat konsep inti. *Pertama*, *tawasuth* dan *i'tidal*, yakni standar moderasi yang pertengahan dan berkeseimbangan tanpa terjebak ke dalam ekstremitas berlebihan dan berkekurangan. Islam mengajarkan sedang dan pertengahan dalam beragama. Konsep *tawasuth* mengajarkan jalan tengah yang terpelihara dari *ifrath* dan *tafrith*. Jalan pertengahan merupakan hal paling utama, paling baik, paling indah, dan paling

bermanfaat dalam beragama. Sementara *i'tidal* merupakan keadilan, keajegan, tidak melewati batas dalam beragama. Dalam beragama, baik ekstrem kanan atau ekstrem kiri, keduanya tercela. *Kedua, tawajun*, yakni standar keseimbangan moderat dengan memenuhi hak segala sesuatu tanpa berlebihan dan kekurangan. Hakikat dari *tawajun* adalah melakukan apa yang sepatutnya, dengan cara yang sepatutnya, dengan ukuran sepatutnya, dan pada waktu sepatutnya. Tanpa moderasi dalam beragama dalam arti keseimbangan dan keberimbangan maka masyarakat akan menghadapi kehancuran, konflik, saling berprasangka, saling menstigma, bahkan saling menghilangkan nyawa atas nama agama. *Ketiga, tasamuh*, yakni toleransi dan saling menghormati atas perbedaan pandangan, pemahaman, dan pengamalan dalam praktek beragama. *Keempat, murunah*, yakni fleksibilitas sebagai bagian penting dari nilai universalitas ajaran agama.

Dalam versi Kemenag RI (2019: 27-28), diskursus *wasathiyah* atau moderasi sering dijabarkan melalui tiga pilar, yakni: moderasi pemikiran, moderasi gerakan, dan moderasi perbuatan. *Pertama* moderasi pemikiran, yakni pemikiran keagamaan yang moderat ditandai dengan kemampuan untuk memadukan antara teks dan konteks. Pemikiran keagamaan yang tidak semata-mata bertumpu pada teks-teks keagamaan dan memaksakan penundukan realitas dan konteks baru pada teks, tetapi mampu mendialogkan keduanya secara dinamis, sehingga pemikiran keagamaan seorang yang moderat tidak semata tekstual, akan tetapi pada saat yang sama juga tidak akan terlalu bebas dan mengabaikan teks. *Kedua* moderasi Gerakan, yakni gerakan penyebaran agama, yang bertujuan untuk mengajak pada kebaikan dan menjauhkan diri dari kemunkaran, harus didasarkan pada ajakan yang dilandasi

dengan prinsip melakukan perbaikan, dan dengan cara yang baik pula, bukan sebaliknya, mencegah kemunkaran dengan cara melakukan kemunkaran baru berupa kekerasan. *Ketiga* moderasi perbuatan, yakni penguatan relasi antara agama dengan tradisi dan kebudayaan masyarakat setempat. Kehadiran agama tidak dihadapkan secara diametral dengan budaya, keduanya saling terbuka membangun dialog menghasilkan kebudayaan baru. Diskursus moderasi tentu saja tidak hanya milik tradisi Islam, melainkan juga agama lain, seperti Kristen. Apalagi dalam konteks Indonesia, karakter keagamaan Kristen juga mengalami 'penyesuaian' dengan atmosfer kebangsaan ke-Indonesiaan. Dengan berbagai tantangan dan dinamikanya, tafsir ideologis kekristenan pun kemudian menemukan konteksnya di Indonesia dan mengakar menjadi bagian dari masyarakat multikultural Indonesia.

Qaumas (Kemenag.go.id, 2021) mengatakan, Indonesia sebagai negara multikultural dan multiagama, ditantang untuk mengelola keragaman dan permasalahan sosial keagamaan. Belakangan, ada beberapa orang yang memiliki pemikiran keagamaan eksklusif dan ekstrem. Mereka mengklaim kebenaran hanya untuk dirinya sendiri dan menyalahkan orang lain. Hal ini menimbulkan ketegangan di masyarakat dan mengancam kerukunan intra dan antar umat beragama di Indonesia. Untuk mengatasi masalah ini, Kementerian Agama mengembangkan konsep Moderasi Beragama. Moderasi Beragama adalah cara pandang yang membawa orang ke jalan tengah, jauh dari jalan yang berlebihan atau ekstrem. Dengan moderasi beragama, cara beragama masyarakat menjadi toleran, tanpa kekerasan, menghargai budaya, dan memiliki komitmen kebangsaan.

Kemenag dan Kemendikbud RI telah memasukkan gagasan moderasi beragama ke dalam ranah Pendidikan. Nadiem Anwar Makarim (2021), mengingatkan pentingnya moderasi agama dalam sistem pendidikan Indonesia. Menurut Nadiem, untuk mencapai kehidupan moderasi beragama, dapat dimulai dari sistem pendidikan karakter dalam program merdeka belajar. Adanya asesmen nasional mendorong survei karakter dan lingkungan belajar yang nantinya akan terlihat nilai-nilai Pancasila, seperti nilai kebhinekaan, toleransi, dan keamanan lingkungan sekolah sehingga bisa mengukur peta mutu pendidikan Indonesia. Ini tidak hanya berbasis kemajuan atau pencapaian kognitif tapi juga nilai-nilai dalam budaya pembelajaran di sekolah. Selain itu, Nadiem menjelaskan profil pelajar Pancasila yang dirumuskan oleh Kemendikbud juga berperan penting dalam menerapkan moderasi beragama lewat sistem Pendidikan.

Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama (Kemenag) RI, M. Ali Ramdhani (2021) menekankan agar pentingnya Penguatan Moderasi Beragama dalam alam yang transnasional. Penguatan Moderasi Beragama menjadi salah satu modal yang perlu dimiliki individu dalam menjalankan peran sosial di tengah masyarakat yang multikultural. Moderasi beragama merupakan hal yang sangat penting, karena sekarang masyarakat Indonesia hidup di sebuah alam yang transnasional dan bergerak sedemikian rupa serta diharapkan memiliki pondasi yang kuat. Pentingnya Penguatan Moderasi Beragama untuk hindari pemahaman-pemahaman ekstrem dalam beragama. Penguatan Moderasi Beragama diterapkan tidak hanya di lembaga keagamaan, tetapi juga dilakukan di lembaga pendidikan seperti pesantren, madrasah, dan sekolah. Lalu untuk di sekolah umum, Ali mengatakan agar Penguatan Moderasi Beragama

menekankan pada tiga hal, yaitu nilai Integritas, solidaritas, dan tenggang rasa dalam rangka mengembangkan pendidikan agama Islam (PAI) yang *rahmatan lil 'alamin*.

Lukman Hakim Saepundin (Kemenag, 2019: 8-11), secara umum, ide dasar pendidikan moderasi beragama adalah untuk mencari persamaan dan bukan mempertajam perbedaan. Menurutnya, jika dielaborasi lebih lanjut, setidaknya ada tiga alasan utama mengapa perlunya pendidikan moderasi beragama di Indonesia:

Pertama, salah satu esensi kehadiran agama adalah untuk menjaga martabat manusia sebagai makhluk mulia ciptaan Tuhan, termasuk menjaga untuk tidak menghilangkan nyawanya. Itu mengapa setiap agama selalu membawa misi damai dan keselamatan. Untuk mencapai itu, agama selalu menghadirkan ajaran tentang keseimbangan dalam berbagai aspek kehidupan; agama juga mengajarkan bahwa menjaga nyawa manusia harus menjadi prioritas, menghilangkan satu nyawa sama artinya dengan menghilangkan nyawa keseluruhan umat manusia. Pendidikan moderasi beragama dapat membimbing seseorang untuk menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Orang yang ekstrem tidak jarang terjebak dalam praktik beragama atas nama Tuhan hanya untuk membela keagungan-Nya saja seraya mengesampingkan aspek kemanusiaan. Orang beragama dengan cara ini rela merendahkan sesama manusia “atas nama Tuhan”, padahal menjaga kemanusiaan itu sendiri adalah bagian dari inti ajaran agama. Sebagian manusia sering mengeksploitasi ajaran agama untuk memenuhi kepentingan hawa nafsunya, kepentingan hewaninya, dan tidak jarang juga untuk melegitimasi hasrat politiknya. Aksi-aksi eksploitatif atas nama agama ini yang menyebabkan kehidupan beragama menjadi tidak seimbang, cenderung ekstrem dan berlebih-

lebih. Jadi, dalam hal ini, pentingnya pendidikan moderasi beragama untuk membimbing cara mengembalikan praktik beragama agar sesuai dengan esensinya, dan agar agama benar-benar berfungsi menjaga harkat dan martabat manusia.

Kedua, ribuan tahun setelah agama-agama lahir, manusia semakin bertambah dan beragam, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, beraneka warna kulit, tersebar di berbagai negeri dan wilayah. Seiring dengan perkembangan dan persebaran umat manusia, agama juga turut berkembang dan tersebar. Karya-karya ulama terdahulu yang ditulis dalam bahasa Arab tidak lagi memadai untuk mewadahi seluruh kompleksitas persoalan kemanusiaan. Teks-teks agama pun mengalami multitafsir, kebenaran menjadi beranak pinak; sebagian pemeluk agama tidak lagi berpegang teguh pada esensi dan hakikat ajaran agamanya, melainkan bersikap fanatik pada tafsir kebenaran versi yang disukainya, dan terkadang tafsir yang sesuai dengan kepentingan politiknya. Maka, konflik pun tak terelakkan. Kompleksitas kehidupan manusia dan agama seperti itu terjadi di berbagai belahan dunia, tidak saja di Indonesia dan Asia, melainkan juga di berbagai belahan dunia lainnya. Konteks ini yang menyebabkan pentingnya moderasi beragama, agar peradaban manusia tidak musnah akibat konflik berlatar agama.

Ketiga, khusus dalam konteks Indonesia, moderasi beragama diperlukan sebagai strategi kebudayaan dalam merawat keindonesiaan. Sebagai bangsa yang sangat heterogen, sejak awal para pendiri bangsa sudah berhasil mewariskan satu bentuk kesepakatan dalam berbangsa dan bernegara, yakni Pancasila dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang telah nyata berhasil menyatukan semua kelompok agama, etnis, bahasa, dan budaya. Indonesia

disepakati bukan negara agama, tapi juga tidak memisahkan agama dari kehidupan sehari-hari warganya. Nilai-nilai agama dijaga, dipadukan dengan nilai-nilai kearifan dan adat-istiadat lokal, beberapa hukum agama dilembagakan oleh negara, ritual agama dan budaya berjaln berkelindan dengan rukun dan damai. Itulah sesungguhnya jati diri Indonesia, negeri yang sangat agamis, dengan karakternya yang santun, toleran, dan mampu berdialog dengan keragaman. Ekstremisme niscaya akan merusak sendi-sendi keindonesiaan, jika dibiarkan tumbuh berkembang. Karenanya, moderasi beragama amat penting dijadikan cara pandang masyarakat bangsa Indonesia yang plural.

Semenjak digulirkan tahun 2019, gagasan moderasi beragama sebagai bagian integral dari system Pendidikan menunjukkan banyak tantangan dari pihak-pihak atau kelompok-kelompok tertentu. Tantangan ini telah menjadi masalah tersendiri bagi berjalannya Pendidikan moderasi beragama di Indonesia secara efektif. Berdasarkan pengamatan dari publikasi media-media sosial local, tantantang-tantangan tersebut berupa kontra wacana dan perlawanan yang lahir dari prasangka sosial kelompok-kelompok tertentu. Hal ini telah menjadi problematika tersendiri bagi berjalannya pendidikan moderasi beragama di Indonesia, khususnya daya penerimaan dari masyarakat luas dan kelompok-kelompok keagamaan yang ada di Indonesia. Jika dielaborasi, problematika pendidikan moderasi beragama di Indonesia masih berhadapan secara tajam dengan hal-hal sebagai berikut:

Pertama, problem prasangka sosial berupa kontra wacana atas pendidikan moderasi beragama dengan menggunakan teori hegemoni. Misalnya, pandangan seorang tokoh pergerakan Islam yang dipublish tanggal 15 bulan Desember tahun 2021 oleh media lokal tintamuslimah.com

dengan judul "*Moderasi Beragama, Virus Barat Berbahaya*" ditulis oleh St. Hartanti seorang aktifis dakwah kampus, diantara narasinya adalah:

Strategi Barat memecah belah umat melalui pengarusutamaan moderasi beragama terkonfirmasi dalam dokumen Rand Corporation. Ada 3 strategi Barat untuk membangun Jaringan Muslim Moderat, diantaranya:

Pertama, Barat menyadari bahwa umat Islam sedang menuju kebangkitannya yang diprediksi sebagai kebangkitan global. Maka kebangkitan ini perlu dihentikan.

Kedua, agar tidak menjadi ancaman bagi peradaban Kapitalis Barat, maka dunia Barat harus melakukan upaya agar dunia Islam ramah terhadap nilai-nilai Barat.

Ketiga, Barat harus melakukan berbagai pemetaan terhadap kelompok umat Islam untuk mengetahui mana kawan dan mana lawan.

Benar saja. Umat Islam saat ini diklasifikasikan menjadi 4 kelompok, yaitu fundamentalis, tradisionalis, modernis dan sekuleris. Kelompok modernis dan sekuleris tentu saja menjadi pendukung utama agenda Barat. Sedangkan tradisionalis adalah mereka yang tidak ingin dicap radikal dan teroris kemudian turut diajak menghadapi kelompok fundamentalis.

Pengklasifikasian kelompok dalam tubuh kaum muslimin ini dilakukan karena kelompok fundamentalis: 1) Menolak nilai-nilai barat dan penjajahan; 2) Menginginkan penerapan Islam secara menyeluruh.

Yang dengan keinginan ini, akan membuat kaum

muslimin senantiasa bersikap kritis atas setiap kebijakan yang merugikan dan merusak umat. Hal ini jelas menjadi ancaman untuk Barat yang akan terus mempertahankan hegemoninya.

Untuk itu, dengan ikut mengarusutamakan moderasi beragama (sebagai salah satu proyek besar Barat), maka Indonesia telah mengumpankan dirinya sebagai alat Barat (proksi) untuk meraih kepentingan penjajahan Barat, baik ekonomi maupun politik. Hegemoni Barat jelas akan semakin menguat di Indonesia, terlebih dengan perhelatan berbaju akademis, AICIS 2021.

Kontra narasi ini merupakan perlawanan terhadap pengarusutamaan pendidikan moderasi beragama yang dilakukan oleh kemenag RI. Pendidikan moderasi beragama dipandang sebagai proyek barat untuk menghegemoni kaum muslimin di Indonesia. Berdasarkan teori hegemoni ini, Pendidikan moderasi beragama merupakan salah satu konsep yang harus menjadi consensus bersama yang harus diterima dan dijalankan oleh kaum muslimin di Indonesia. Teori hegemoni ini menyatakan bahwa di dalam struktur sosial selalu ada pertarungan untuk memperebutkan penerimaan publik. Dalam hal ini kelompok yang berkuasa akan selalu berusaha untuk membuat agar masyarakat yang dikuasai menerima nilai-nilai dan pola pikir penguasa tanpa perlawanan. Strategi kunci dalam keberhasilan hegemoni adalah nalar awam, di mana masyarakat awam akan menerima begitu saja apa yang diberikan oleh penguasa ke dalam pikiran mereka. Hegemoni adalah suatu kemenangan yang didapatkan melalui sebuah mekanisme consensus yang dipakasakan. Hegemoni juga merujuk pada kedudukan ideologi dari satu atau lebih kelompok di dalam masyarakat sipil yang lebih tinggi dari yang lainnya (lihat: Nezar Patria,

Andi Arief, 2003, 119-121). Artinya, jika pendidikan moderasi beragama dipersepsi sebagai bagian dari hegemoni. Maka pendidikan moderasi beragama akan selalu disangka sebagai bentuk penguasaan terhadap kelompok tertentu dengan menggunakan kepemimpinan intelektual dan moral secara consensus dengan menciptakan cara berpikir atau wacana tertentu yang dominan yang harus dianggap benar. Satu sisi, disosialisasikan secara massif sehingga masyarakat meyakini wacana tersebut sebagai sesuatu yang benar. Pada sisi yang lain, hegemoni juga dapat membuat wacana lain yang dianggap sebagai sesuatu yang salah atau menyimpang (lihat. Christiany Juditha, 2018, 16-30).

Gerakan kontra wacana dengan menggunakan teori hegemoni ini akan melahirkan prasangka sosial secara massif di kalangan masyarakat. Dan akan menjadi problem besar bagi pengarusutamaan pendidikan moderasi beragama di Indonesia. Satu sisi, pendidikan moderasi beragama bertujuan untuk menyentuh aspek kognitif, afeksi dan psikomotorik masyarakat agar bisa beragama secara moderat. Sisi yang lain, gerakan kontra wacana juga secara massif melakukan propaganda yang bisa menyentuh aspek kognitif, afeksi dan psikomotorik di kalangan masyarakat agar melakukan penolakan dengan prasangka bahwa pendidikan moderasi beragama sebagai bagian dari hegemoni atau konspirasi Gerakan global Barat dengan penguasa Indonesia untuk memperlemah kekuatan ajaran agama, terutama Islam.

Kedua, problem prasangka sosial berupa propaganda isu atas pendidikan moderasi beragama dengan menggunakan teori benturan peradaban. Pandangan dengan menggunakan teori benturan peradaban ini diantaranya:

Sepintas ide ini nampak positif dan elegan. Namun menurutnya, moderasi beragama diduga merupakan dukungan pemerintah terhadap Global War on Terrorism (GWOt), kampanye Barat yang dilancarkan pascaperistiwa WTC 11 September 2001.

Senjata Barat untuk Melemahkan Generasi Muslim. Barat merasa terancam penjajahan yang selama ini mereka cengkeramkan di negeri-negeri muslim akan terusik jika umat Islam bangkit. Sebab, hanya Islam yang menyadarkan umat tentang akar masalah kezaliman dan penderitaan yang mereka alami selama ini, yakni penerapan sekularisme, kapitalisme, dan demokrasi. Islamlah yang akan menampakkan wajah buruk mereka. Karenanya dengan berbagai cara mereka berupaya agar umat Islam jauh dari ajaran agamanya. Mereka tahu bahwa kekuatan itu hadir ketika umat Islam menyatu dengan agamanya. Para politisi dan intelektual Barat membuat klasifikasi Islam moderat versus Islam radikal. Ia menunjuk, Islam moderat ialah Islam yang tidak anti Barat, tidak bertentangan dengan sekularisme, di mana substansi Islam moderat adalah Islam sekuler, menerima nilai-nilai Barat (demokrasi, HAM), berkompromi dengan imperialisme Barat (Puspita, Tintasiyasi.com, 2021).

Barat mendefinisikan "Islam moderat" sebagai lawan dari "Islam radikal". Sedangkan radikal adalah 'sikap tidak mau kompromi dengan nilai-nilai Barat' sehingga Islam moderat adalah yang mau mengikuti arahan Barat. Inilah Islam versi Barat.

Ringkasnya Islam moderat adalah pemahaman Islam yang disesuaikan dengan pemikiran, pemahaman, dan peradaban Barat. Hasilnya, Muslim moderat adalah

Muslim yang menerima, mengambil, menyebarkan dan menjalankan pemahaman Islam ala Barat.

Sebenarnya gagasan moderasi Islam cacat secara metodologi. Sehingga ide moderasi dengan jargon tolerannya, berusaha memalingkan ajaran agama Islam yang sah menuju ajaran sekuler Barat. Sungguh ini bukti penjajahan Barat terhadap kaum Muslimin (Perwita Sari, radarkotanews.com, 2022).

Barat terus berupaya mempertahankan hegemoninya atas dunia. Mereka sangat berkepentingan agar sistem kapitalisme neoliberal tetap bercokol di negeri-negeri Islam. Karena melalui sistem ini, praktik penjajahan dan perampokan kekayaan alam bisa berjalan mulus dan legal.

Setelah umat merespons negatif terhadap strategi terorisme dan radikalisme, serta sejalan dengan makin terbongkarnya kedok mereka, AS merancang moderasi beragama sebagai senjata barunya untuk menyerang Islam dan kaum muslim, serta menjauhkan mereka dari Islam kafah dan perjuangannya. Akhirnya, tidak lain adalah untuk makin mengukuhkan demokrasi dan kapitalisme.

Barat memanfaatkan kebodohan umat dengan moderasi beragama yang tak lain adalah hasil dari proses pembodohan yang telah ada sebelumnya, yakni dengan menanamkan Islam sebatas agama ruhiyah semata. Hingga ketika mulai muncul semangat kebangkitan Islam, Barat memalingkan umat dari Islam dengan karakternya sebagai ideologi global.

Oleh karenanya, proyek baru ini hanyalah sekuel (kelanjutan) dari proyek-proyek jahat sebelumnya. Namun, saat ini proyek ini cukup berhasil memukau

sebagian kalangan, lantaran Barat menarasikan Islam dengan istilah Islam ramah atau Islam jalan tengah (moderat); tak condong ke kiri atau liberal, tak pula condong ke kanan atau radikal.

Dengan proyek ini, mereka memaksa kita menilai dan mendefinisikan Islam dengan cara pandang Barat, yakni Islam yang kompromistis dengan nilai-nilai mereka, tidak menyerang mereka, toleran terhadap sistem hidup mereka, serta siap menanggalkan syariat atas nama modernitas, kesetaraan, dan perdamaian dunia.

Sejatinya, Barat telah menggunakan Islam moderat sebagai alat pembunuh yang mematikan. Menjauhkan umat dari rahasia kebangkitannya, serta dari identitas hakikinya sebagai umat terbaik, umat pemimpin. Bahkan, menjauhkan dari makna ummatan wasathan yang sesungguhnya, yakni umat yang berpegang teguh pada kebenaran, tak berkompromi dengan kebatilan, dan kelak menjadi saksi atas umat lainnya tentang kebenaran itu (Hayyin Thohiro, muslimahnews.com, 2021)

Narasi diatas merupakan refresentasi dari prasangka sosial yang menyimpulkan bahwa pendidikan moderasi beragama merupakan upaya penanaman peradaban Barat sekuler dan kapitalis terhadap kaum muslimin di Indonesia. Berdasarkan teori benturan peradaban, Esposito (2987: 195), dalam kacamata Barat bahwa sebuah ancaman besar yang harus dipertimbangkan, yaitu kebangkitan Islam. Saat ini Islam mulai bangkit kembali dalam satu semangat budaya yang islami dan memiliki potensi jumlah penganut yang besar, serta memiliki kemampuan untuk memobilisasi penganutnya secara massal. Oleh karena itu, Islam juga seringkali digambarkan sebagai ancaman yang memiliki tiga

bentuk: ancaman politik, ancaman peradaban, dan ancaman demografi (Esposito, 1987: 195). Pandangan simplitis dari sebagian cendikawan barat ini, menurut Samuel Huntington yang dirujuk oleh Vita Fitria (2009: 48), Barat telah diposisikan sebagai identitas tersendiri yang seakan-akan kokoh. Kokohnya identitas peradaban Barat ini merupakan hasil pembersihan, penyingkiran, penyisihan, dan marginalisasi peradaban selain Barat. Salah satu caranya menurut Pabotinggi (1986: 214), menggunakan kekuatan yang memiliki daya paksa untuk membuat orang banyak mengikuti dan mematuhi syarat-syarat suatu cara tertentu. Dalam konteks hegemoni peradaban mencakup perluasan dan pelestarian “kepatuhan aktif” dari kelompok-kelompok yang didominasi oleh kelas berkuasa lewat penggunaan kepemimpinan intelektual, moral dan politik. Hegemoni peradaban menekankan pada dominasi ideologis atau politis atas kaidah-kaidah moral dan intelektual yang berlaku. Hegemoni, melalui produk-produknya, menjadi penentu satu-satunya dari apa yang dipandang benar secara moral maupun intelektual. Artinya, salah satu dampak dari adanya benturan peradaban lahirnya dominasi sosial negara tertentu, dimana *“arah lain senantiasa didiamkan, dilenyapkan dari diskusi, dan diperlakukan sebagai tak ada”*.

Pendidikan moderasi beragama yang telah disangka oleh sebagian umat Islam sebagai bagian dari proyek Barat untuk melemahkan peradaban Islam akan menjadi problem cukup berat bagi Pemerintahan Indonesia yang diwakili oleh KEMANAG RI dalam melakukan pengarusutaman moderasi beragama kepada masyarakat luas. Prasangka sosial ini akan terus melahirkan perlawanan demi perlawanan dari sebagian umat Islam terhadap pendidikan moderasi beragama di Indonesia. Sebagian penggerak yang melakukan perlawanan terhadap salah satu kebijakan Pemerintahan ini

telah berprasangka bahwa moderasi beragama merupakan upaya menceraibut kekuatan umat Islam dari akar ajarannya. Sebagian mereka menganggap bahwa moderasi beragama merupakan konsep berbahaya dari para imperialisme epistemologi Barat. Misalnya, Puspita (Tintasiyasi.com, 2021), berpandangan tentang pentingnya memberikan pencerahan kepada umat tentang bahaya imperialisme epistemologi Barat ini. Caranya dengan membentengi umat dari narasi moderasi beragama dengan menjelaskan kebatilan dan kerusakannya bagi umat Islam. Umat Islam harus diberi penjelasan tentang hakikat Islam yang sebenarnya sesuai al Qur'an dan al hadits serta berbagai kesesatan isme-isme yang dipropagandakan Barat kafir. Umat Islam harus bersuara. Tidak boleh diam menyembunyikan kebenaran Islam dan kesesatan kaum kafir.

Prasangka sosial dengan pendekatan teori benturan peradaban telah memposisikan segala ide-ide yang dianggap melemahkan ideologi Islam sebagai bagi dari invasi intelektual Barat terhadap dunia Islam, termasuk gagasan tentang moderasi beragama Menurut Idrus Ruslan (2019, 59: 60), invasi intelektual merupakan serangan pemikiran yang dilancarkan oleh Barat kepada dunia Islam. Dalam bahasa Arab disebut dengan *al-Ghazwal al-Fikr*, yang berupa serangan non fisik. Serangan ini dapat melalui teknologi, komunikasi, elektronik dan media massa. Pada tiap-tiap ideologi memiliki kemutlakan dan inisiatif untuk memberikan keyakinan pada orang atau kelompok lain dengan berbagai usaha agar doktrin ideologinya tersebut dapat diterima oleh pihak lain. Usaha inilah yang disebut dengan *brain washing*. Gerakan *brain washing* biasanya dilakukan dengan cara-cara yang tidak fair. Sebagai perang urat syaraf, Gerakan *brain washing* mempunyai strategi

mengbolehkan segala cara untuk mencapai tujuannya. Invasi intelektual yang dilakukan oleh dunia Barat secara umum yang memiliki kekuatan di berbagai sektor terhadap dunia Islam yang berada pada posisi yang lemah saat ini. Selain gerakan *brain washing* terdapat pula istilah lain yakni *westernisasi*. Gerakan *westernisasi* adalah proses pembaratan, pengambilalihan, atau peniruan budaya barat. Segala tata cara kehidupan dalam *westernisasi* mengacu pada budaya dunia barat. Artinya gerakan *westernisasi* merupakan hegemoni peradaban Barat dalam berbagai aspek kehidupan terhadap Islam dengan tujuan agar kaum muslim mengikuti pola sikap dan perilaku mereka. Sehingga kaum muslim tidak berpegang lagi pada ajaran agama yang diyakininya.

Pendidikan moderasi beragama yang disangka oleh Sebagian umat Islam sebagai bagian dari invasi intelektual, gerakan *brain washing* dan *westernisasi* ini akan menjadi tantangan tersendiri. Karena prasangka ini akan melahirkan perlawanan dalam bentuk serua-seruan terhadap Pendidikan moderasi beragama. Sepakat dengan Esposito (1996: 65), produk yang disangka sebagai pengaruh modernisasi yang berasal dari Barat akan selalu menghadapi tantangan penolakan dan penarikan diri sebagian umat Islam dari hal-hal yang dianggap sekulerisme dan *westernisasi*, dan modernisme.

Ketiga, problem prasangka sosial dengan menggunakan teori oligarki. Pandangan dan prasangka dengan menggunakan argumentasi oligarki ini diantaranya:

Menanggapi maraknya isu radikalisme, Aktivistis 98 Agung Wisnuwardana mengatakan, isu tersebut karena agenda kepentingan elit politik global kapitalisme. "(Radikalisme) merupakan agenda global, terutama kepentingan elit politik global kapitalisme," tuturnya

dalam Catatan Peradaban: Isu Radikalisme Lebih Berbahaya dari Kebobrokan Negara? di kanal YouTube Peradaban Islam ID, Kamis (10/6/2021).

Ia menjelaskan, isu radikalisme seperti dua mata pisau, pertama, mengikuti agenda elit global. "Isu radikalisme digunakan untuk memberikan cap, memberikan monsterisasi pada mereka-mereka yang berbeda dengan kepentingan elit yang sekarang ini berkuasa," tuturnya. Kedua, bagi oligarki lokal dimanfaatkan untuk menyingkirkan kalangan-kalangan yang bertentangan dengan kepentingan golongan mereka. "Mereka memanfaatkan isu ini, isu global dan pasti merusak sasarannya Islam tapi buat elit lokal akhirnya isu ini juga dimanfaatkan untuk kepentingan politik secara jangka pendek maupun jangka panjang untuk kepentingan kekuasaan mereka," tegasnya.

"Tetapi kalau radikalisme untuk elit lokal, elit lokal dimaknai oligarki lokal. Oligarki lokal menariknya mereka memiliki kepentingan secara konteks, kepentingan kelompoknya mungkin kepentingan partainya, mungkin kepentingan dirinya yang ingin mempertahankan kekuasaan," imbuhnya.

Ia menjelaskan di balik isu radikalisme ada juga moderasi beragama. Menurutnya ada beberapa motif di balik narasi moderasi beragama. Pertama, mencegah Islam politik yang dimaknai Islam politik, yaitu, mengatur urusan umat. Padahal, Islam bukan sekadar mengatur ranah privat, tapi juga ranah publik, yakni mengatur urusan ekonomi, sosia, dan yang lainnya. "Karena kalau Islam politik hadir akan berhadapan dengan nilai-nilai Barat bagaimana Islam memiliki pandangan ekonomi tentang sumber daya yang tidak

boleh diprivatisasi, sementara ekonomi Barat malah membiarkan privatisasi bahkan sumber daya yang menguasai hajat hidup orang banyak bisa dimiliki oleh segelintir orang,” terangnya. Kedua, untuk menghindari kesan Amerika Serikat (AS) menentang Islam. Sehingga, dibuatlah Islam moderat dan Islam radikal. Menurutnya, hal itu dilakukan karena ingin memberikan kesan bahwa Islam radikal bukanlah Islam yang sebenarnya, Islam yang sebenarnya adalah Islam moderat. “(Islam moderat) diamini tokoh-tokoh Islam sedunia dengan membuat Islam wasatiah. Islam wasatiah dianggapnya Islam moderat, padahal wasatiah bukan moderat tapi adil dan pilihan. Sistem yang adil dan pilihan hanya bisa terwujud kalau syariat Islam diterapkan secara kaffah,” tegasnya. (lihat. Tintasiyasi, 2021; kanal YouTube Peradaban Islam ID, 2021; kanal YouTube MimbarTube, 2022).

Pandangan ini menunjukkan prasangka sosial yang telah menempatkan bahwa Pendidikan moderasi beragama merupakan bagian dari produk oligarki global dan lokal. Pandangan dan sangkaan ini dikuatkan dengan sebuah pernyataan Sikap Pengurus Majelis Wilayah Korp Alumni Mahasiswa Islam (KAHMI) Propinsi Lampung Tentang Fenomena Oligarki Kekuasaan Negara Dalam Realitas Politik, Ekonomi Dan Hukum Yang Mendegradasi Nilai Sosial Budaya Dan Kehidupan Beragama. Salah satu butir dari prolog dari pernyataan ini menyebutkan bahwa Terbitnya SK Bersama tiga menteri (Pendidikan, Agama dan Menteri Dalam negeri) Nomor 02/KB/2021, Nomor 025-199 Tahun 2021, dan Nomor 219 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Pakaian Seragam dan Atribut Bagi Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan Sekolah yang

Diselenggarakan Pemerintah Daerah Pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah, meskipun dimaknai sebagai usaha menjaga eksistensi ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika; serta membangun dan memperkuat moderasi beragama dan toleransi atas keragaman agama yang dianut peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan, pada kenyataannya intervensi oligarki kekuasaan negara menyelusup membatasi nilai ajaran agama yang menjadi hak dasar warga negara bebas berkembang dalam kehidupan beragama anak didik atau tenaga pendidik dengan kehidupan sosialnya. Oligarki kekuasaan telah mendegradasi ajaran agama tersekularisasi dalam batasan seragam anak didik dan para tenaga pendidik (Widiantika, radarlampung.co.id, 2021).

Artinya pendidikan moderasi beragama telah dipersepsi sebagai bagian dari produk oligarki kekuasaan yang berhubungan dengan upaya mempertahankan kekayaan dan posisi sentral eksklusif pribadi maupun kelompok tertentu. Bagi Winter (2011: 10), merujuk kepada politik pertahanan kekayaan oleh pelaku yang memiliki kekayaan material. Pertahanan kekayaan oleh Oligark mencakup tantangan dan kapasitas tertentu yang tak dimiliki bentuk dominasi atau eksklusi minoritas lain. Oligarki menjabarkan cara pertahanan dilakukan dengan proses yang amat beragam di berbagai konteks politik dan periode sejarah. Seta (2021), menyebutkan bahwa oligarki punya kekuatan dan kekuasaan untuk melakukan pemaksaan secara legal terhadap siapapun. Oligarki dengan kekayaannya selalu mengerakkan atau mempengaruhi orang lain dengan cara memobilisasi pelbagai kekuasaan demi mempertahankan sumber daya material yang dikuasainya. Oligarki sebagai

pelaku politik akan memperluas penguasaan sumber daya material dalam pelbagai bentuk dengan menciptakan kebijakan-kebijakan yang bisa mendukung gerakannya.

Prasangka sosial yang berpijak kepada argumentasi teori oligarki ini merupakan problem besar bagi pemerintahan dalam mensosialisasikan Pendidikan moderasi beragama kepada masyarakat secara luas. Satu sisi, hambatan yang akan membuat lelah melakukan klarifikasi kepada masyarakat melalui pelbagai media bahwa pendidikan moderasi beragama diperlukan sebuah kehidupan yang lebih damai dan toleran di Indonesia yang majemuk. Sisi lain, kelompok-kelompok yang memiliki persepsi negative terhadap pendidikan moderasi beragama yang dikembangkan oleh Kemenag RI akan terus memperluas propagandanya dalam pelbagai jejaring, diskusi dan seruan-seruan media sosial. Bahkan perlawanan ini dapat menjadi Gerakan sosial berbasis globalisasi kontra hegemoni. Tidak seperti globalisasi neoliberal, globalisasi kontra-hegemoni menggunakan pemikiran globalisasi untuk menolak segala bentuk dominasi oleh hegemoni dan mengoperasikan proses bawah-ke-atas yang mengutamakan penguatan wilayah tingkat lokal. Peter Evens (2005), telah mendefinisikan globalisasi kontra-hegemoni sebagai "upaya global untuk menggantikan rezim global neoliberal dengan rezim yang memaksimalkan kendali politik demokratis dan menjadikan pembangunan kemampuan manusia yang setara dan perlindungan lingkungan sebagai prioritasnya. Gabungan jejaring aktivis dan pemikir kritis nasional maupun transnasional mulai menganggap gerakan globalisasi kontra-hegemoni sebagai obat politik yang efektif dan menjanjikan untuk melawan globalisasi yang berorientasi pada dominasi.

Keempat, problem prasangka sosial yang bersumber dari kesalahan memposisikan gagasan pendidikan moderasi beragama berhubungan dengan tradisi besar (*great tradition*) agama bukan tradisi kecil agama (*litte tradition*). Dalam beberapa judul dan tulisan-tulisan di media-media sosial, para aktifis yang kontra terhadap Pendidikan moderasi beragama telah merubahnya menjadi istilah moderasi agama bahkan ada sebagian kecil menggunakan istilah moderasi Islam. Salah satu contoh perubahan istilah yang sebagian sudah dipublish di media sosial, misalnya:

"Sejatinya, baik radikalisme dan moderasi agama adalah proyek ciptaan Barat untuk menghalau kebangkitan pemikiran islam," ujar netizen akun @AAlabqary dikutip Isu Bogor dari Twitter, Sabtu, 2 Oktober 2021 (isubogor.pikiran-rakyat.com, 2 Oktober 2021)

Perubahan istilah ini akan berdampak kepada pergeseran makna yang sesungguhnya dari istilah moderasi beragama yang dimaksud oleh Kemenag RI. Dalam kajian semantik menurut J.D. Parera (2004: 145), pergeseran makna itu berupa gejala perluasan, penyempitan, pengonotasian (konotasi), pensinestesian (sinestesia), dan pengasosiasian makna dari sebuah kata. Ida Nursida (2014: 49), menyebutkan makna kata dapat mengalami pergeseran akibat adanya sikap dan penilaian tertentu pada masyarakat pemakainya. Sehingga makna kata dapat mengalami degradasi atau peyorasi, yakni makna kata yang akhirnya dianggap memiliki nilai rendah atau berkonotasi negatif. Kemudian adanya elevasi atau ameliorasi, yakni suatu kata yang memiliki makna kata yang dianggap memiliki nilai ataupun konotasi yang positif dibandingkan makna sebelumnya.

Moderasi beragama yang penyebutannya oleh sebagian orang atau kelompok tertentu telah menjadi moderasi agama akan mengalami perluasan atau penyempitan makna. Sehingga moderasi beragama yang dimaksud oleh tim, Kemenag RI dalam pandangan masyarakat luas akan dianggap sebagai konsep yang dapat mendegradasi makna agama atau Islam itu sendiri kepada makna yang rendah nilainya bahkan berkonotasi negatif. Dalam konteks ini terdapat kekeliruan sebagian orang dengan menyamakan istilah beragama dengan agama. Tim Kemenag RI telah mengklarifikasi tentang kesalahan Sebagian orang yang telah menyamakan istilah moderasi beragama dengan moderasi agama. Menurut Tim Kemenag RI (2019:15), Tidak sama. Agama tidak perlu dimoderasi karena agama itu sendiri telah mengajarkan prinsip moderasi, keadilan dan keseimbangan. Jadi bukan agama yang harus dimoderasi, melainkan cara penganut agama dalam menjalankan agamanya itulah yang harus dimoderasi. Tidak ada agama yang mengajarkan ekstremitas, tapi tidak sedikit orang yang menjalankan ajaran agama berubah menjadi ekstrem.

Tim Kemenag RI (2019: 16) memberikan contoh perbedaan tersebut. Misalnya, ajaran agama untuk memuliakan perempuan. Ajaran ini bersifat pasti dan tidak ada yang diperdebatkan, itulah ajaran agama. Tapi, bagaimana cara memuliakan perempuan menurut ajaran agama itu, masing-masing umat beragama melakukan praktik yang berbeda-beda. Itulah yang disebut beragama. Contoh yang mudah terlihat misalnya ada paham dan amalan agama yang ekstrem membatasi aktivitas sosial perempuan, seperti larangan keluar rumah bagi perempuan meski untuk menuntut ilmu. Namun, ada juga paham dan amalan agama yang memberi ruang kebebasan ekstrem bagi

perempuan untuk beraktifitas sosial sehingga menyepelkan tanggung jawab mengurus keluarga. Di antara keduanya itu, ada juga paham dan amalan agama yang cenderung moderat, dengan memberikan hak-hak kesetaraan gender kepada perempuan, tetapi tetap membatasinya dengan etika dan adat istiadat lokal yang berlaku.

Secara teoritis penambahan awalan ber dalam kata agama dalam Bahasa Indonesia berfungsi sebagai pembentuk kata kerja atau kata sifat. Jadi kata beragama adalah kalimat aktif bukan kalimat pasif. Sedangkan kata agama itu sendiri merupakan kata dasar sebagai satuan bahasa terkecil yang mempunyai makna tersendiri. Agama sebagai kata dasar merupakan kata yang belum memiliki imbuhan, sehingga belum mengalami perubahan bentuk dan makna. Kata dasar dapat diartikan sebagai kata awal untuk membentuk kata yang lebih besar (lihat. Hasan Alwi, dkk, 2002). Oleh karena itu, Ketika moderasi beragama diganti menjadi moderasi agama akan mengalami perubahan bentuk dan maknanya, dari sesuatu yang aktif menjadi pasif, dari praktek ajaran yang bersifat fleksibel dan multi tafsir menjadi prinsip ajaran yang baku dan kaku, dari sesuatu yang profan menjadi sesuatu yang sakral.

Adlin Sila (2021) telah menegaskan bahwa moderasi beragama bukan moderasi agama. Agama tidak perlu dimoderasi karena agama itu sendiri telah mengajarkan prinsip moderasi, keadilan, dan keseimbangan. Jadi menurut Adlin termasuk juga mewakili pandangan Kemenag RI bahwa bukan agamanya yang harus dimoderasi melainkan cara pandang dan sikap umat beragama dalam memahami dan menjalankan agamanya yang harus moderasi. Tidak ada agama yang mengajarkan

ekstrimis, tapi tidak sedikit orang yang memaknai dan menjalankan ajaran agamanya secara ekstrem.

Pandangan Kemenag RI tentang moderasi beragama bukan moderasi agama sudah dalam posisi yang benar. Artinya moderasi beragama telah diposisikan sebagai *litte traditions*. Tradisi kecil yang berupa penafsiran teks agama yang harus diadaptasikan dengan kondisi keragaman suku, etnis, budaya dan agama dalam berbangsa. Gagasan moderasi beragama sebagai *litte tradition* merupakan representasi ekspresi keberagamaan yang harus menggambarkan penerimaan atas budaya atau tradisi lokal dimana masyarakat pemeluk agama tertentu tinggal. Ekspresi keberagamaan kaum muslim yang diharapkan dapat terbuka dengan pelbagai perbedaan suku, etnis, budaya dan agama yang lainnya.

Kelima, Prasangka sosial yang bersumber dari kategorisasi sosial. Problem Pendidikan moderasi beragama ini lahir dari kuatnya pemetaan kategori bermasalah antara kelompok dalam (*ingroup*) dan kelompok luar (*outgroup*). Kuatnya mengkategorikan sosial orang atau kelompok lain akan berdampak kepada penerimaan diri secara terbuka terhadap pelbagai gagasan. Sepanjang kuatnya kategori sosial tidak ada upaya *dekategorisasi* sosial maka tidak akan terjadi perubahan penilaian yang terkait dengan penentuan keberbedaan sosial (lihat. Otten & Matschke 2008: 292). Dalam hal ini, kategori sosial dengan stigma radikal terhadap yang lain menurut Haidar Nashir (2018), menjadi paradoks dan tidak adil manakala baju radikal dan radikalisme disematkan terbatas pada satu paham dan golongan, seperti kepada umat Islam. Paham, sikap, dan tindakan radikal dalam makna ekstrem, intoleran, dan keras dalam kenyataan terdapat pada paham dan golongan lainnya, termasuk radikal dalam paham kebangsaan, baik

atas nama nasionalisme maupun pandangan agama dan ideologi lain yang serbaekstrem, eksklusif, dan tidak jarang mengandung muatan intoleransi dan kekerasan. Paradoks tentang pandangan radikalisme seperti itu menunjukkan reduksi dan kekeliruan pemikiran yang menunjukkan bukti radikalisme dalam wujud lain. Lebih keliru lagi manakala ada semacam otoritas tertentu yang diberikan atau digunakan oleh golongan keagamaan tertentu untuk melabeli pihak lain yang berbeda dengannya sebagai radikal dan radikalisme Islam. Apalagi jika label radikalisme Islam itu harus selalu ada demi melestarikan proyek deradikalisme. Tudingan radikal dan radikalisme Islam menjadi sangat murah-meriah, bergantung pada pihak yang dominan dan berkepentingan dalam politik keagamaan.

Dalam konteks inilah, Pendidikan moderasi beragama akan berhadapan dengan prasangka sosial yang kuat dari kelompok lain karena sebelumnya mereka sudah dikategorisasi sosial sebagai kelompok radikal, ekstrem, kelompok anti plural, anti NKRI, anti Pancasila dan lainnya. pada situasi seperti inilah pentingnya keobjektifan pandangan secara adil dan komprehensif tentang pengelompokan sosial agar tidak terjebak pada reduksi, salah pemikiran dan melahirkan prasangka sosial yang semakin tajam. Sepakat dengan Otten & Matschke (2008:293), dalam konteks pendidikan antaragama secara khusus, dibutuhkan upaya dekategorisasi, rekategorisasi dan diferensiasi timbal balik sosial. Misalnya, tidak lagi mengkategorikan tetangga Muslim sebagai Muslim, orang yang berbeda pemahaman bukan sebagai radikal, anti nasionalis dan Pancasila tetapi melalui persahabatan pribadi dan kemanusiaan. Dalam melakukannya, baik dekategorisasi dan rekategorisasi mengandaikan bahwa

'pembedaan asli antara ingroup dan outgroup lebih baik ditinggalkan demi pandangan mengembangkan mitra interaksi atau mendukung persepsi kategoris baru yang lebih luas' (Otten & Matschke 2008 :294).

Dekategorisasi dan rekategorisasi sosial merupakan upaya meminimalisir lahirnya prasangka sosial dari orang atau kelompok lain karena menghadapi kategorisasi mungkin dipandang sebagai ancaman terhadap identitas mereka dan menolak untuk menerapkannya pelbagai tawaran gagasan dari kelompok yang sudah mengkategorisasinya. Spertin halnya gagasan moderasi beragama yang sudah dikembangkan oleh Kemenag RI. Menurut Otten dan Matschke (2008: 295), model diferensiasi timbal balik sosial merupakan upaya mengembangkan identitas sosial yang positif untuk meningkatkan hubungan antarkelompok secara konstruktif. Artinya adanya upaya mengabungkan dengan *ingroup* dan *outgroup* dalam ruang-ruang atau agenda-agenda untuk saling memiliki ketergantungan secara positif, dimana setiap kelompok mengadopsi peran yang berbeda dan secara bersamaan saling melengkapi, kelompok dapat mulai menghargai satu sama lain tanpa harus melepaskan kebutuhan mereka akan kekhasan positifnya. Sebagai contoh, Kristen, Hindu, Budha, dan Islam, atau kelompok-kelompok keagamaan yang berbeda dalam masyarakat agar dapat berkolaborasi dalam kontribusi yang saling melengkapi menuju pendidikan perdamaian, yang tidak dapat dicapai oleh kelompok masing-masing.

Proses dekategorisasi, rekategorisasi dan diferensiasi timbal balik sosial ini akan meminimalisir terjadinya prasangka sosial yang lahir akibat kuatnya kategori-kategori sosial antara kelompok satu dengan kelompok lainnya. Sepakat dengan Alport yang dikutip oleh Sturmer (2008:

284), hal ini dapat menjadi solusi konstruktif, dimana kontak antara kelompok yang berbeda berkontribusi pada pengurangan prasangka sosial dengan lahirnya, (1) tujuan yang dilakukan bersama, (2) kerjasama antar kelompok, (3) status yang sama antara kelompok, dan (4) dukungan otoritas, norma atau hukum, dan (5) harus memberikan kesempatan untuk mengembangkan persahabatan melintasi batas-batas kelompok. Situasi sosial seperti inilah yang dibutuhkan bagi efektifitasnya Pendidikan moderasi beragama di Indonesia.

Dalam dunia akademis, pendidikan moderasi beragama ini telah dianggap penting untuk mengembangkan perilaku toleran, saling menghormati satu sama lain, menghargai perbedaan, persahabatan melintasi batas-batas kelompok, dan prasangka sosial di kalangan sebagian masyarakat atau kelompok keagamaan yang kerap melahirkan konflik horizontal. Dalam konteks ini, hasil wawancara kepada mahasiswa Angkatan 2020 di UIN sebanyak 184 orang pada bulan Oktober sampai dengan bulan September 2022 dengan pertanyaan tunggal, yakni: *“Kehidupan beragama di Indonesia berdasarkan analisa sebagian kelompok dan cendikia muslim menunjukkan semakin tidak ramah. Peristiwa saling mencela, menghina bahkan menghukumi kerap sering terjadi sesama muslim. Belum lagi, interaksi antara agama sering terjadi konflik horizontal. Dalam situasi ini, Kemenag tahunn 2019 memunculkan program moderasi beragama sebagai solusi dari peristiwa kehidupan beragama yang tidak diharapkan dan kerap sering terjadi. Coba analisa oleh anda tentang pentingnya pengarusutamaan moderasi beragama pada saat ini di Indonesia? Jawabannya para mahasiswa diantaranya:*

“Moderasi beragama itu adalah cara pandang, sikap dan praktik beragama dalam kehidupan bersama dengan cara mengejawantahkan esensi ajaran agama yang melindungi martabat kemanusiaan dan membangun kemashlahatan umum berlandaskan prinsip, adil, keseimbangan dan menaati konstitusi sebagai kesepakatan berbangsa. Jadi pendidikan moderasi beragama itu penting untuk Indonesia karena di Indonesia adalah negara yang masyarakatnya sangat religius dan majemuk. Artinya Pendidikan moderasi beragama akan menampilkan kemerdekaan beragama yang dijamin oleh konstitusi dan sekaligus mampu menjaga keseimbangan antara kebebasan beragama itu sendiri dengan komitmen kebangsaan untuk menumbuhkan cinta tanah air” (Nashirun Nabi, Mahasiswa UIN Angkatan 2020).

“Pentingnya pengarusutamaan moderasi beragama pada saat ini di Indonesia untuk merubah cara pandang kita dalam beragama secara moderat, yakni memahami dan mengamalkan ajaran agama dengan menggunakan akal. Menjadi Moderat bukan berarti menjadi lemah dalam beragama. Akan tetapi menguatkan karakteristik umat beragama yang ramah yang sesuai untuk kontur masyarakat Indonesia yang majemuk” (Muhammad Tajjul Arasy, Mahasiswa UIN Angkatan 2020).

“Empat tahun terakhir Kementerian Agama aktif mempromosikan pengarusutamaan moderasi beragama. Moderasi beragama adalah cara pandang kita dalam beragama secara moderat, yakni memahami dan mengamalkan ajaran agama dengan

tidak ekstrem, baik ekstrem kanan maupun ekstrem kiri. Ekstremisme, radikalisme, ujaran kebencian (hate speech), sehingga menimbulkan retaknya hubungan antarumat beragama. Hal ini merupakan problem yang dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini. Sehingga, adanya program pengarusutamaan moderasi beragama ini dinilai penting dan menemukan momentumnya. Bentuk ekstremisme terjewantahkan dalam dua bentuk yang berlebihan. Dua kutub yang saling berlawanan. Satu pada kutub kanan yang sangat kaku dalam beragama. Memahami ajaran agama dengan membuang jauh-jauh penggunaan akal. Sementara di pihak yang lain justru sebaliknya, sangat longgar dan bebas dalam memahami sumber ajaran Islam. Kebebasan tersebut tampak pada penggunaan akal yang sangat berlebihan, sehingga menempatkan akal sebagai tolak ukur kebenaran sebuah ajaran. Sikap moderat dan moderasi adalah suatu sikap dewasa yang baik dan yang sangat diperlukan. Radikalisasi dan radikalisme, kekerasan dan kejahatan, termasuk kebencian/caci maki dan hoaks, terutama atas nama agama adalah kekanak-kanakan, jahat, memecah belah, merusak kehidupan, patologis, dan tidak baik, Oleh karena itu pendidikan Moderasi beragama merupakan usaha positif untuk mengembangkan suatu sikap keberagaman di tengah pelbagai desakan yang berbeda, seperti klaim kebenaran absolut, antara interpretasi literal dan penolakan yang arogan atas ajaran agama, juga antara radikalisme dan sekularisme. Komitmen utama pendidikan moderasi

beragama terhadap toleransi sebagai cara terbaik untuk menghadapi radikalisme agama yang mengancam kehidupan beragama itu sendiri, yang berimbas kepada persatuan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Memperhatikan sikap keberagamaan dalam dinamika berbangsa dan bernegara akhir-akhir ini, maka Pendidikan moderasai beragama menjadi sesuatu yang penting dan dapat menjadi solusi kehidupan berbangsa dalam menjaga kemajemukan sebagai kekayaan dan modal sosial Indonesia (Reni Nuraeni, Mahasiswa UIN Angkatan 2020)

“Kita perlu Pendidikan moderasi beragama sebagai solusi dan menjadi kunci penting untuk menciptakan kehidupan keagamaan yang rukun, harmoni, damai, serta menekankan keseimbangan, baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, maupun kehidupan secara keseluruhan di Indonesia. Pendidikan moderasi beragama harus menjadi konsepsi yang dapat membangun sikap toleran dan rukun guna memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa” (Siti Rahmawati, Syahnaz Nurratu Pratiwi, Muhamad Zuhdy, Mahasiswa UIN Angkatan 2020).

“Ide dasar moderasi adalah untuk mencari persamaan dan bukan mempertajam perbedaan. Ada alasan kita perlu Pendidikan moderasi beragama 1. Untuk menjaga martabat manusia sebagai makhluk mulia ciptaan Tuhan, termasuk menjaga untuk menghilangkan nyawanya. 2. Ribuan tahun setelah agama agama lahir, manusia semakin bertambah dan

beragam. 3. Moderasi beragama di perlukan sebagai strategi kebudayaan kita dalam merawat keindonesiaan” (Zulfa Taffana Nur Aini, Mahasiswa UIN Angkatan 2020).

Jawaban mahasiswa angkatan 2022 sebagai generasi muda mileunial telah menunjukkan bahwa pendidikan moderasi beragama sangat penting ditarsformasikan kepada masyarakat Indonesia yang heterogen atau majemuk. Ditengah berkecamuk prasangka sosial yang melahirkan daya tolak kepada Pendidikan moderasi beragama dibutuhkan agensi yang ada dilingkungan Pendidikan. Murtadlo (2015), menyebutkan agar pendidikan moderasi beragama berjalan efektif, dibutuhkan pelibatan semua subjek (agensi) di sekitar proses pendidikan secara terpadu. Sebab diakui atau tidak hari ini, praktik pendidikan moderasi beragama masih banyak diwarnai improvisasi spontan dari para pelaku pendidikan. Gagasan moderasi beragama masih menimbulkan kesalahpahaman dan prasangka sosial dalam masyarakat, termasuk pendidik, yang berasumsi bahwa ide moderasi beragama terkesan seperti agama baru, meragukan konsep universalitas agama yang ada, dan terkesan menjinakkan kelompok mayoritas terhadap minoritas.

Simpulan

Weiss (1986:62), menyebutkan bahwa pendidikan memainkan peran penting dalam memelihara subkultur tetap harmoni di tengah-tengah adanya penyebaran prasangka sosial dan agama. Konten pendidikan yang bertanggung jawab untuk pembentukan dan penyebaran persepsi-persepsi positif ditengah-tengah masyarakat majemuk. Adanya prasangka sosial muncul baik dari perbedaan pengamatan yang ada antara kelompok sosial yang berbeda atau dari pengaruh sosial yang mungkin dialami seseorang dalam perjalanan hidupnya melalui orang tua, teman sebaya, sekolah, lingkungan dan media massa. Termasuk juga, prasangka sosial yang muncul dari sebagian orang atau kelompok dalam menyikapi Pendidikan moderasi beragama.

Prasangka sosial terhadap pendidikan moderasi beragama tersebut pada akhirnya diturunkan oleh para agen sosialisasi seperti keluarga, teman sebaya, sekolah, lingkungan dan media massa yang didesain oleh sebagian kelompok. Analisa tentang prasangka sosial sebagai problematika Pendidikan moderasi beragama sangat penting bagi para agensinya dalam memahami pengaruh sosial dan nilai-nilai subcultural yang telah melahirkan prasangka sosial tersebut. Paling tidak, problem Pendidikan moderasi beragama dapat diidentifikasi secara umum dengan cara mempertimbangkan koeksistensi budaya dan subkultur yang berbeda. Pendidikan sebagai alat dalam menginternalisasai gagasan moderasi beragama, maka harus sampai kepada tujuan sejatinya, yakni: tujuan personal (*private goals*) dan tujuan kolektif (*public goals*), negara. Oleh karena itu, penguatan kapasitas para agen moderasi beragama, termasuk dalam memahami problem sosialisasi dan pelaksanaan pendidikannya menjadi

sesuatu hal utama agar implementasinya bisa berjalan secara efektif dan sesuai dengan tujuan kementerian Agama RI (2019), yakni: lahirnya relasi agama dan negara (komitmen kebangsaan), relasi antarumat beragama (toleransi), ekspresi keagamaan yang ramah (nirkekerasan), serta relasi agama dan budaya (arif terhadap budaya lokal).

Daftar Pustaka

1. Clobert, M., Saroglou, V., Hwang, K. K., Soong, W. L. (2014). *East Asian religious tolerance-A myth or reality? Empirical investigations of religious prejudice in East Asian societies*. *Journal of Cross-Cultural Psychology*, 45, 1515–1533.
2. Christiany Juditha. 2018. *Hegemoni Media Sosial: Akun Gosip Instagram @Lambe_Turah*. BPSDMP KOMINFO Manado: *Jurnal Penelitian Komunikasi dan Opini Publik* Vol. 22 No. 1, Juli 2018: 16-30
3. David O. Sears, Jonathan L. Freedman, L. Anne Peplau. (1991). *Psikologi Sosial*. Alih Bahasa oleh Michael Adryanto, Jakarta: Erlangga.
4. David Elkind & Freddy Sweet (2004). *How to do character education*. Diakses tanggal 27 September 2022 dari http://www.goodcharacter.com/Article_4.html.
5. Deti Mega Purnamasari. (2019). *Cerita Jusuf Kalla Saat Jadi Mediator Konflik Poso dan Ambon*, Kompas.com. diakses tanggal 20 Januari 2022.
6. Dominic Abrams. (2010). *Processes of prejudice: Theory, evidence and intervention* Centre for the Study of Group Processes, The Arndale Centre Manchester University of Kent: Equality and Human Rights Commission

- Arndale House. diakses tanggal 25 Januari 2022
dialamat <https://www.equalityhumanrights.com/en>
7. Dubravka Cecez-Kecmanovic. (2007). *Critical Research In Information Systems: The Question Of Methodology*, Association for Information Systems AIS Electronic Library (AISeL), Proceedings European Conference on Information Systems (ECIS), 1446-1457.
 8. DWnesia. (2021). *Beragam Kisah Harmoni Dan Perdamaian Dari Poso*, www.tempo.co, diakses tanggal 20 Januari 2022.
 9. Esposito, John L. 1996. *Ancaman Islam, Mitos Atau Realitas?* Edisi Revisi: Menggugat Tesis Huntington. Bandung: Mizan.
 10. Evans, Peter (2005). "*Counterhegemonic globalization: transnational social movements in the contemporary global political economy*". Dalam Janoski, Thomas, et al. (Eds.). *The Handbook of Political Sociology: States, Civil Societies, and Globalization*. Cambridge University Press.
 11. Fay, B. (1987). *Critical Social Science: Liberation and its Limits*. Cornell University Press, Ithaca, NY
 12. Fdikom UIN Jakarta. 2022. *Lukman Hakim Saifudin Paparkan Moderasi Agama di Hadapan Peserta Sertifikasi Haji dan Umrah Angkatan 6*. Diakses pada tanggal 4 Pebruari 2002 di laman <https://fdikom.uinjkt.ac.id/lukman-hakim-saifudin-paparkan-moderasi-agama-di-hadapan-peserta-sertifikasi-haji-dan-umrah-angkatan-6/>
 13. Hall, D. L., Matz, D. C., Wood, W. (2010). *Why don't we practice what we preach? A meta-analytic review of religious racism*. *Personality and Social Psychology Review*, 14, 126–139.

14. Hasan Alwi, dkk. 2002. *Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia*. Edisi ke-3. Jakarta: Balai. Pustaka.
15. Ida Nursida. 2014. *Perubahan Makna Sebab dan Bentuknya: Sebuah Kajian Historis*. UIN SMH Banten: Alfaz (Arabic Literatures for Academic Zealots) [Vol 2 No 1 \(2014\): Januari-Juni 2014](#) p. 46--61, june 2014. ISSN 2620-5351. Diakses pada tanggal 4 Februari 2022 di laman <http://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/alfaz/article/view/582>>.
16. Jacques Bertrand. (2002), *Legacies of the Authoritarian Past: Religious Violence in Indonesia's Moluccan Islands*, Pacific Affairs: University of British Columbia, Vol. 75, No. 1 (Spring), pp. 57-85. diakses tanggal 21 Januari 2022.
17. Jan S. Aritonang. (2004). *Sejarah perjumpaan Kristen dan Islam di Indonesia*, Jakarta: BPK Gunung Mulia.
18. Johnson, M. K., Rowatt, W. C., LaBouff, J. (2010). *Priming Christian religious concepts increases racial prejudice*. Social Psychological and Personality Science, 1, 119–126.
19. Johnson, M. K., Rowatt, W. C., LaBouff, J. P. (2012). *Religiosity and prejudice revisited: In-group favoritism, out-group derogation, or both?* Psychology of Religion and Spirituality, 4, 154–168
20. Jeffrey A. Winters. 2011. *Oligarki*. Jakarta: Gramedia Pustaka
21. Kartono, Kartini. (1981). *Patologi Sosial jilid 1*. Bandung: Rajawali Press.
22. Kementerian Agama RI. (2019), *Moderasi Beragama*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.

23. Murtadlo M. Hubungan Mesir-Indonesia dalam modernisasi pendidikan Islam. *Jurnal Al-Qalam* 2018; 24(2): 297–306.
24. Murtadlo M. Islam dan pendidikan madrasah di Philipina. *Jurnal Edukasi* 2015; 13(1): 45–60.
25. Murtadlo M. Pengembangan pendidikan agama berkearifan lokal di Tanah Ulayat Baduy. *Edukasi* 2017; 15(1): 73–8
26. Murtadlo M. Reproduksi paham keagamaan dan respon tuduhan radikal (Studi kasus Pesantren Ngruki Pasca Bom Bali 2002). *Jurnal Harmoni* 2017; 16(1): 75–93.
27. Nathanael Gratias Sumaktoyo. (2021) *Ethnic and Religious Sentiments In Indonesian Politics: Evidence From The 2017 Jakarta Gubernatorial Election*, Journal of East Asian Studies: Cambridge University Press, Volume 21 , Issue 1 , March 2021 , pp. 141 – 164.
28. Nashir, Haedar. (2018), Paradoks Radikalisme. Diakses tanggal 27 Pebruari 2022 dari <https://s3pi.umy.ac.id/paradoks-radikalisme/>
29. *Papalia*, E. Diane & Sally Wendkos. (1985). *Psychology*. New York: Mc Graw.
30. *Parekh, Bikhu*. (2000). *Rethinking Multiculturalism: Cultural Diversity*, London: Macmillan Sage Publication.
31. Patria, Nezar. Arief, Andi. *Antonio Gramsci Negara dan Hegemoni*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003
32. Puspita. 2021. *Analisis Politik dan Media: Bahaya Moderasi Beragama Sungguh Nyata*, diakses tanggal 25 Januari 2022 di alamat <https://www.tintasiyasi.com/2021/11/analisis-politik-dan-media-bahaya.html>.

33. Pabotinggi, Mochtar, peny. (1986). *Islam Antara Visi, Tradisi dan Hegemoni Bukan-Muslim*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
34. Pennsylvania State University World Campus. (2017). *Lesson 6: Intergroup Relations/Diversity*. diakses tanggal 25 Januari 2022 di alamat <https://psu.instructure.com/courses/1867078/modules/items/22915547>
35. Pikiran-Rakyat.com. 2021. *Tagar 'Tolak Moderasi Beragama' Menggema di Twitter, Netizen Singgung Proyek Ciptaan Barat dan Radikalisme*, Diakses pada tanggal 4 Pebruari 2002 di laman <https://isubogor.pikiran-rakyat.com/gaduh/pr-452718278/tagar-tolak-moderasi-beragama-menggema-di-twitter-netizen-singgung-proyek-ciptaan-barat-dan-radikalisme>
36. Parera, J.D. 2004. *Teori Semantik*. Jakarta: Erlangga.
37. Qaumas, Yakult Cholil. (2021). diakses tanggal 21 Januari 2022 dari <https://kemenag.go.id/read/menag-tegaskan-moderasi-beragama-penting-dalam-memperkuat-negara>.
38. Rowatt, W. C., LaBouff, J., Johnson, M. K., Froese, P., Tsang, J. (2009). *Associations among religiousness, social attitudes, and prejudice in a national random sample of American adults*. *Psychology of Religion and Spirituality*, 1, 14–24
39. Ruslan, Idrus. 2019. *Dominasi Barat Dan Pengaruhnya Terhadap Dunia Islam*, UIN Raden Intan Lampung: Al-Adyan, Volume 14, Nomor 1.
40. S Truna, Dody., Zakaria, Tatang. (t.t), *Prasangka Agama dan Etnik*, UIN Sunan GUnung Djati Bandung: Prodi S2 Studi Agama-Agama.

41. Sidney Jones. (t.t). *Causes of Conflict in Indonesia*, www.asiasociety.org, t.t. diakses tanggal 21 Januari 2022
42. St. Hartati. 2021. *Moderasi Beragama, Virus Berbahaya Barat*. diakses tanggal 25 Januari 2022 dialamat <https://tintamuslimah.com/2021/12/15/moderasi-beragama-virus-barat-yang-berbahaya/>
43. Sumanto Al Qurtuby. (2012/2013). *Reconciliation from Below: Indonesia's Religious Conflict and Grassroots Agency for Peace*, Peace Research: Canadian Mennonite University, Vol. 44/45, No. 2/1, pp. 135-162. diakses tanggal 21 Januari 2022
44. Sumanto Al Qurtuby. (2016). *Religious Violence and Conciliation in Indonesia: Christians and Muslims in the Moluccas*, Britania: Routledge.
45. Sari. Puspita. 2022. Penguatan Moderasi Beragama Melanggengkan Penjajahan Barat. diakses tanggal 25 Januari 2022 dialamat <https://www.radarkotanews.com/penguatan-moderasi-beragama-melanggengkan-penjajahan-barat/>
46. Sila, Adlin. (2021), *Moderasi Beragama, Bukan Moderasi Agama*. diakses tanggal 7 Pebruari 2022 dialamat <https://ntb.kemenag.go.id/baca/1623942720/moderasi-beragama-bukan-moderasi-agama>
47. Stürmer, S., (2008), '*Die Kontakthypothese*' [*The contact hypothesis*], in L.-E. Petersen & B. Six (eds.), *Stereotype, Vorurteile und soziale Diskriminierung: Theorien, Befunde und Interventionen* [*Stereotypes, prejudices and social discrimination. Theories, findings and interventions*], Bernheim: Beltz, pp. 283-291.
48. Thomas Santoso. (2003). *Mobilisasi Massa: studi kasus kekerasan politik-agama di Situbondo*. Surabaya: Lutfansyah Mediatama.

49. Thohiro, Hayyin. 2021. *Moderasi Beragama, Senjata Baru Barat (AS) dengan Ulama dan Cendekiawan sebagai Pelontarnya*, diakses tanggal 25 Januari 2022 dialamat <https://www.muslimahnews.com/2021/10/21/moderasi-beragama-senjata-baru-barat-as-dengan-ulama-dan-cendekiawan-sebagai-pelontarnya/>
50. Tinta Siyasi. 2021. *Isu Radikalisme, Aktivistis 98: Agenda Kepentingan Elit Politik Global Kapitalisme*, diakses tanggal 1 Pebruari 2022 di alamat <https://www.tintasiyasi.com/2021/06/isu-radikalisme-aktivis-98-agenda.html>.
51. Tim Penyusun Kementerian Agama RI. 2019. *Tanya Jawab Moderasi Beragama*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
52. Otten, S. & Matschke, C., 2008, '*Dekategorisierung, Rekategorisierung und das Modell wechselseitiger Differenzierung*' [*Decategorization, recategorization and the model of reciprocal differentiation*], in L.-E. Petersen & B. Six (eds.), *Stereotype, Vorurteile und soziale Diskriminierung: Theorien, Befunde und Interventionen* [*Stereotypes, prejudices and social discrimination. Theories, findings and interventions*]. Bernheim: Beltz, pp. 292-300.
53. Worchel, S., Cooper, R., Goethals, G.R. & Olson, J.M. (2000). *Social Psychology*. USA: Thomson Learning
54. Widisantika. 2021. *KAHMI Lampung Sikapi Fenomena Oligarki Kekuasaan Negara*. diakses tanggal 1 Pebruari 2022 dialamat <https://radarlampung.co.id/kahmi-lampung-sikapi-fenomena-oligarki-kekuasaan-negara/>
55. Weiss, H. (1986). '*Antisemitische Vorurteile in Österreich nach 1945. Ergebnisse empirischer Forschungen*' (*Antisemitic prejudices in Austria after*

- 1945. Results of empirical research], in A. Silbermann & J.H. Schoeps (eds.). Cologne German: Verlag Wiissenschaft und Politik.*
56. Zanden, James V., Scarr, Sandra W. (1984), *Introduction Psychology, USA*: Random House.